

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *UN WOMEN* DALAM UPAYA MENGATASI
KETIDAKSETARAAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI NIGERIA**

TAHUN 2016-2020

SKRIPSI



Oleh:

TIARA RIZKI AULIA

19323161

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *UN WOMEN* DALAM UPAYA MENGATASI
KETIDAKSETARAAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI NIGERIA
TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

TIARA RIZKI AULIA

19323161

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

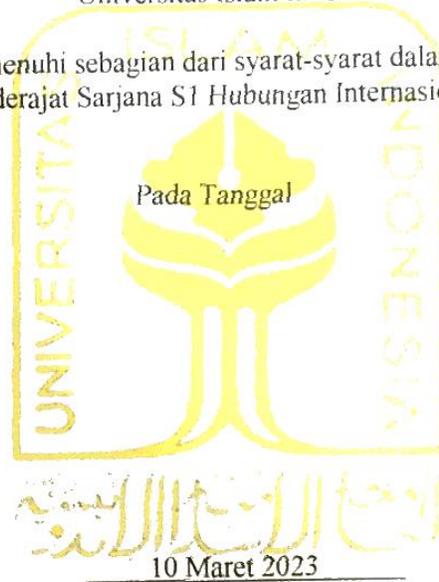
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UN WOMEN DALAM UPAYA
MENGATASI KETIDAKSETARAAN GENDER TERHADAP
PEREMPUAN DI NIGERIA TAHUN 2016-2020

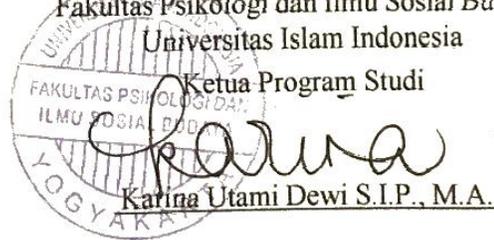
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Ketua Program Studi
Karina Utami Dewi S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Gustri Eni Putri. S.IP. M.A.
2. Masitoh Nur Rohma, S.Hub. Int, M.A.
3. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

10 Maret 2023,



Tiara Rizki Aulia

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'aalamiin

Dengan rasa syukur karya sederhana ini penulis persembahkan untuk :

Ayah dan Ibu :

Terima kasih atas semua doa yang selalu mengalir setiap waktu. Terima kasih juga untuk semua dukungan, kekuatan, rasa cinta kasih yang tiada terhingga. Semoga Ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan panjang umur.

Kakak Tersayang :

Terima kasih atas semangat dan dukungannya dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.

Teman-temanku Tercinta :

Terima kasih sudah senantiasa kebersamai dalam setiap proses nya.

Teruntuk Diri Sendiri

Terima kasih sudah bertahan hingga saat ini.

الجمعة المباركة
الاستاذة
التي
التي

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

- (Q.S Al Insyirah : 5)-

“Semua ada hikmahnya”

-Diya Ayu Utami-

“It always seems impossible until it’s done”

-Nelson Mandela-

“ A woman with a voice is, by definition
A strong woman”

-Melinda Gates-

الجمعة المستد الاندو

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'aalamiin

Bismillahirrohmanirrohim, puji dan syukur tak terhingga kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas ridho dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Impelementasi Kebijakan UN Women dalam Upaya Mengatasi Ketidaksetaraan Gender Terhadap Perempuan di Nigeria Tahun 2016-2020”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

Penulis menyadari selama menyelesaikan tulisan ini banyak pihak yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, bantuan, dan bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan karya ini. Terima kasih kepada :

1. Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan tulisan ini.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Dr. Phil. Qurotul Uyun, S.Psi., M.si.,Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Terima kasih yang sedalam-dalam nya atas ilmu yang telah diberikan selama menjalani masa perkuliahan.
5. Ibu Gustrini Putri, S.I.P., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya atas semua bimbingan, saran, waktu, dan ilmu yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan tugas akhir. Tanpa beliau penulis

tidak dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama proses bimbingan yang dilakukan penulis. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk ibu dan keluarga.

6. Ibu Masitoh Nur Rohmah S.I.P., M.A. dan Ibu Karina Utami Dewi S.I.P., M.A. selaku dosen penguji pada sidang skripsi penulis. Terima kasih atas semua saran dan tambahan kepada penelitian penulis. Semua saran dan masukan yang diberikan sangat membantu penelitian penulis menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf apabila selama proses sidang penulis masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga ibu sekeluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas semua ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk bapak dan ibu sekalian.
8. Kepada keluarga tercinta, ayah dan ibu, terima kasih sudah memberikan dukungan dan doa yang selalu mengalir setiap waktu. Teruntuk kakak-kakak kesayangan Yaya, ayuk Thesa Amijayanti dan abang Terry Atmajaya, terima kasih sudah memberikan bantuan moril dan materil kepada adekmu yang tercinta ini. Kalian luar biasa.
9. Teruntuk Istiqomah dan Diya Ayu Putri Utami (Mae) terima kasih telah menjadi saksi lika-liku perjuangan tugas akhir. Terima kasih telah sangat bersabar dan memberikan motivasi, nasehat, dan pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih juga sudah bersedia menjadi pendengar yang baik. Meskipun pertemuan kita singkat, namun kalian telah banyak mengajarkan indahnyanya kebersamaan dibalut oleh kesederhanaan. Di manapun kalian berada, tetaplah menjadi sosok yang selalu membawa kehangatan dan canda tawa.
10. Teruntuk Venny Maudina, terima kasih Ven sudah bersedia untuk merangkul dan mengingatkan selama proses penulisan ini. Terima kasih atas semua hal-hal baik yang Venny berikan. Berkat dorongan dan omelanmu akhirnya bisa

sampai ke tahap akhir. Tetaplah menjadi pohon rindang di manapun, kapanpun, dan dengan siapapun itu.

11. Silvanah, mbak Inas, terima kasih ya sudah mau direpotkan dalam hal ini itu selama proses penulisan ini. Terima kasih atas nasehat dan petuah sakral nya.
12. Putri Aninda Rohman. Hai Put, terima kasih sudah meramaikan hari-hari mahasiswa semester akhirku, terima kasih untuk semua memori-memori kebersamaan selama masa perkuliahan. Tetap menjadi Putri yang selalu ingat pada hal-hal kecil apapun itu ya.
13. Zulfah dan Yulia. Terima kasih untuk semua wejangan, nasihat, dan hal-hal luar bisa mengagumkan yang kalian berikan. Semoga Allah selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan.
14. Desi Ariani, Mira Ervinda, Sri Cahyani. Terima kasih atas *support* nya yang luar biasa meskipun jarak memisahkan kita, namun kalian selalu memberikan dukungan pada setiap prosesnya.
15. Tiana, Dewi, dan Yufita. Terima kasih sudah bersedia direpotkan dalam keriwahan skripsiku.
16. Teruntuk teman-teman KKN 70, hadirnya kalian menjadi salah satu hal yang aku syukuri selama masa perkuliahan ini. Terima kasih ya.

Penulis menyadari penelitian skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca akan membantu perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan kepada para pembaca sekaligus dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam hubungan internasional.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
ABSTRAK	xvi
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan Penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian.....	16
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	16
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	16
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	16
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	17
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
UN WOMEN DAN KETIDAKSETARAAN GENDER DI BIDANG EKONOMI, POLITIK TERHADAP PEREMPUAN DI NIGERIA.....	19
2.1. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) sebagai Organisasi Internasional.....	19
2.2 Ketidaksetaraan Gender Terhadap Perempuan di Nigeria.....	24
BAB III.....	36
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UN WOMEN DALAM MENGATASI KETIDAKSETARAAN GENDER DI BIDANG EKONOMI DAN POLITIK WANITA DI NIGERIA	36

3.1 Monitoring oleh UN Women di Bidang Politik dan Ekonomi Terhadap Perempuan di Nigeria Tahun 2016-2020	38
3.2 Kerja Sama UN Women dengan Pemerintah Nigeria, Masyarakat Sipil, NGO, ILO, UNHCR, UNDP, FAO dalam Mengatasi Ketidaksetaraan Gender di Bidang Ekonomi dan Politik di Nigeria	44
3.2.1 Kerja sama UN Women, Pemerintah Nigeria, Masyarakat Sipil Nigeria, NGO.....	45
3.3 Bantuan Keuangan dan Teknis Oleh UN Women kepada Nigeria Untuk Mengatasi Ketidaksetaraan Gender di Bidang Ekonomi dan Politik Perempuan Nigeria	50
3.4 Implementasi Kebijakan UN Women Dalam Pengembangan Kapasitas Perempuan Nigeria Melalui Program Pemberdayaan di Bidang Ekonomi dan Politik	54
BAB IV	64
PENUTUP	64
2.1. Kesimpulan	64
2.2 Rekomendasi.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketenagakerjaan dan Kegiatan Ekonomi Nigeria

Tabel 2. Permasalahan Perempuan di Nigeria di Bidang Ekonomi dan Politik



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tiga Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional

Gambar 2. Angkatan Kerja Perempuan di Nigeria dari tahun 2016-2020

Gambar 3. Total Budget Tahunan UN Women untuk Nigeria

Gambar 4. Demonstrasi Proses Pendaftaran Selama Peuncuran MasterCard

Gambar 5. Peserta Pelatihan Legislator Perempuan Tentang Legislasi Responsif

Gender



DAFTAR SINGKATAN

ACR	: Annual Country Report
AFA	: Alliance for Africa
CDD	: Center for Democracy Development
CEDAW	: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women
CEPAN	: Centre for Peace Advancement in Nigeria
CIPSMN	: Chartered Institute of Purchasing and Supply
CSW	: Commission on the Status of Women
CWEEN	: Christian Women for Excellent and Empowerment in Nigeria Society
ECES	: European Centre for Electoral Support
ECOSOC	: Economic and Social Council
ECOWAS	: Economic Community of West African States
FAO	: Food Agriculture Organization
FGE	: Fund for Gender Equality
GEWE	: Gender Equality and Women Empowerment
GGR	: Gender Gap Report
IANSA	: International Action Network on Small Arms Women Network
IEAS	: Independent Evaluation and Audit Services
IFES	: International Foundation for Electoral Systems
ILO	: International Labour Organization
IRI	: International Republican Institute
INEC	: Independent National Electoral Commission
NBSN	: National Bureau Statistic of Nigeria
NDI	: National Democratic Institute
NGO	: Non Government Organization
NILDS	: National Institute for Legislative and Democratic Studies
NWTF	: Nigeria Women Trust Fund
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
SDG	: Sustainable Development Goals
SMEDAN	: Small and Medium Enterprises Development Agency of Nigeria
SRC	: Students Representative Committee
UNDP	: United Nations Development Programme
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees
UNIDO	: United Nations of the Industrial Development Organization
UN WOMEN	: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
WANEP	: West Africa Network for Peace building
WARDC	: Women's Advocacy and Research Development Committee
WEE CRA	: Women's Economic Empowerment through Climate Resilient Agriculture

WEF : World Economic Forum
WEPs : World Empowerment Principles
WFP : World Food Programme
WISCAR : Women in Successful Careers



ABSTRAK

Ketidaksetaraan gender di Nigeria telah menjadi pembahasan nasional dan dirasakan di beberapa bidang seperti ekonomi dan politik. Pada tahun 2016 ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi dan politik terhadap perempuan Nigeria mengalami peningkatan dan terus menempatkan perempuan Nigeria pada posisi yang rentan ditambah lagi pada tahun 2020 hingga 2021 pandemi COVID-19 menyerang seluruh dunia termasuk Nigeria. Hal itu menyebabkan banyak perempuan menjadi semakin rentan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi dan politik terhadap perempuan Nigeria, kapasitas sumber daya manusia yang kurang dan budaya masyarakat yang patriarki menyebabkan ketidaksetaraan gender di Nigeria telah mengakar bertahun-tahun di negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UN Women dalam mengatasi kekerasan berbasis gender di bidang ekonomi dan politik terhadap perempuan Nigeria pada tahun 2016-2021 dengan menggunakan konsep implementasi organisasi internasional melalui pendekatan manajerial yang memiliki beberapa metode monitoring oleh berbagai aktor, kerja sama dengan berbagai aktor, pengembangan kapasitas negara melalui program organisasi internasional, dan memberikan bantuan keuangan juga teknis kepada Nigeria.

Kata Kunci : Ketidaksetaraan Gender, Nigeria, UN Women, Implementasi Organisasi Internasional, Ekonomi dan Politik

ABSTRACT

Gender inequality in Nigeria has become a national discussion and is felt in several areas such as the economy and politics. In 2016, gender inequality in the economic and political spheres against Nigerian women increased and continues to put Nigerian women in a vulnerable position plus in 2020 to 2021 the COVID-19 pandemic attacked the entire world including Nigeria. This has made many women even more vulnerable. There are several factors that influence gender inequality in the economic and political spheres against Nigerian women, the lack of human resource capacity and the patriarchal culture of society have caused gender inequality in Nigeria to take root for many years in the country. This study aims to analyze the role of UN Women in overcoming gender-based violence in the economic and political fields against Nigerian women in 2016-2021 by using the concept of international organization implementation through a managerial approach which has several methods of monitoring by various actors, cooperation with various actors, developing state capacity through international organization programs, and providing financial and technical assistance to Nigeria.

Keywords: *Gender Inequality, Nigeria, UN Women, International Organization Implementation, Economy and Politics*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nigeria adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Afrika Barat yang berbatasan dengan Chad di bagian Timur, Republik Niger di bagian Utara, Benin di bagian Barat, dan Kamerun di bagian Selatan. Nigeria memiliki jumlah populasi terbanyak nomor tujuh di dunia, populasi negara tersebut pada tahun 2020 mencapai 206.140 juta penduduk (Ceicdata 2020). Populasi yang banyak menjadikan Nigeria sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor satu dengan persentase sebesar 15.98% dari total keseluruhan populasi di kawasan Afrika. Namun perekonomian Nigeria masih rendah, bahkan terdapat fakta bahwa kemiskinan yang menghantui Nigeria membuat para perempuan harus menjual dirinya untuk mendapatkan Indomie (Tempo 2021). Hal itulah yang kemudian menyebabkan meningkatnya ketidaksetaraan gender yang ada di Nigeria. Ketidaksetaraan gender terhadap perempuan Nigeria dirasakan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi dan politik yang menjadi paling tinggi tindakan ketidaksetaraannya dan sering sekali hak-hak perempuan di Nigeria dilanggar (Orjinmo Nduka 2020). Adanya dominasi laki-laki membuat semakin banyak tindakan diskriminatif dan penindasan kepada perempuan. (Abubakar GB 2017).

Ketidaksetaraan gender yang paling banyak dirasakan oleh perempuan Nigeria terutama di bidang ekonomi dan politik. Ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi yang perempuan Nigeria hadapi contohnya seperti, jumlah partisipasi pekerja

perempuan di Nigeria sedikit dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja laki-laki. Selain itu terjadi pengkotak-kotakan pekerjaan antara perempuan dan laki-laki yang mana pekerjaan perempuan lebih banyak di bidang jasa, pertanian, dan level ke bawah sedangkan laki-laki memegang kendali pada jenis pekerjaan yang lebih baik. Dalam hal gaji perempuan Nigeria juga mendapatkan gaji yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki bahkan beberapa dari mereka ada yang tidak dibayar gajinya, hal itu membuat perekonomian perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Keputusan mengatur keuangan keluarga juga lebih banyak dipegang oleh laki-laki sehingga perempuan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kebutuhan rumah tangga serta urusan lainnya, namun mereka tetap diikutsertakan dalam pembiayaan kehidupan rumah tangga mereka. Hal itulah yang membuat kondisi perempuan Nigeria menjadi terdesak ditambah dengan gaji mereka yang nominalnya sedikit, di saat mereka membutuhkan uang untuk membiayai kehidupannya. Perempuan Nigeria juga banyak mengalami ketidaksetaraan gender di ranah politik ditandai dengan jumlah partisipasi politik perempuan Nigeria yang sedikit dibandingkan dengan jumlah partisipasi politik laki-laki yang hampir mendominasi. Kurangnya keterlibatan perempuan di ranah publik seperti bidang politik dan ekonomi ini disebabkan karena banyak hal, namun yang paling besar berasal dari sumber daya manusia yang kurang mumpuni dan besarnya budaya masyarakat yang patriarki di Nigeria menyebabkan hal ini terjadi (UN Women n.d.).

Beberapa hal yang dipaparkan tadi menempatkan kondisi dan posisi perempuan di Nigeria sangat rentan keberadaannya. Ruang gerak mereka dipersempit oleh keadaan

dan aturan yang berlaku di Nigeria. Banyak hak-hak yang seharusnya mereka dapat dan rasakan namun bertolak belakang dengan kondisi di sana. Di Nigeria sendiri telah ada kebijakan gender nasional yang memiliki komitmen untuk tindakan menyetarakan antara perempuan dan laki-laki, tetapi peraturan yang berlaku itu masih memiliki nilai-nilai yang dapat menimbulkan tindakan diskriminasi kepada perempuan, ditambah Pemerintah Nigeria masih banyak praktek korupsi yang membuat ekonomi negara semakin merosot dan penyalahgunaan dana bantuan yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung program pemberdayaan perempuan (The Conversation 2023). Untuk itulah diperlukan bantuan dari pihak ketiga atau aktor lain seperti organisasi internasional, salah satunya dengan *United Nations Entity For Gender Equality and Empowerment of Women* (UN Women n.d.). UN Women merupakan entitas khusus yang dibuat oleh organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan isu-isu mengenai perempuan, contohnya seperti kekerasan dan ketidaksetaraan gender. UN Women memiliki fokus bidang prioritas (UN Women n.d), yang pertama adalah *increasing women's leadership and participation, ending violence against women* terkait dengan masih banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban karena kekerasan baik fisik maupun psikis, *engaging women in all aspects of peace and security processes* karena perempuan kerap kali menjadi korban dari konflik maupun perang, maka dari itu UN Women ingin melibatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, *enhancing women's economic empowerment* di mana perempuan sangat berkontribusi dalam ekonomi, bisnis, bahkan pertanian sebagai pengusaha maupun karyawan, namun ini tidak sejalan dengan upah perempuan yang cenderung lebih kecil dan kehidupan

perempuan tidak menjadi lebih baik. Empat bidang prioritas itu yang menjadi norma-norma UN Women sebagai organisasi internasional yang memiliki fokus pada perwujudan kesetaraan gender di negara anggota. Apabila negara anggota mengalami permasalahan dari salah satu bidang prioritas tersebut, maka UN Women akan memberikan bantuan kepada negara tujuan, salah satunya adalah Nigeria.

Melihat permasalahan yang dihadapi perempuan di Nigeria, organisasi internasional seperti *United Nations Entity for Women* (UN Women) memberikan bantuan dan program-program pemberdayaan kepada para perempuan dalam mengurangi kasus-kasus ketidaksetaraan gender terhadap perempuan di Nigeria. Dalam menyelesaikan dan membantu permasalahan perempuan di Nigeria, UN Women juga bekerjasama dengan beberapa aktor yang menjadi mitranya baik itu dengan pemerintah dan masyarakat sipil yang ada di Nigeria, hingga dengan beberapa aktor domestik dan internasional. Di tahun 2020 UN Women bersama dengan pemerintah Nigeria bekerjasama untuk fokus terhadap pemberdayaan perempuan di Nigeria, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan dan pemberdayaan politik perempuan (UN Women Afrika, n.d.).

Berdasarkan penjelasan di atas pembahasan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan UN Women dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi dan politik terhadap perempuan di Nigeria pada tahun 2016-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan UN Women dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi dan politik terhadap perempuan di Nigeria pada tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

Untuk menjelaskan mengenai implementasi kebijakan UN Women dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi dan politik terhadap perempuan di Nigeria pada tahun 2016-2020.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini hanya dibatasi dari tahun 2016 hingga 2020 dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan aktor organisasi internasional seperti UN Women dalam mengurangi ketidaksetaraan gender di Nigeria dengan melakukan aksi pemberdayaan perempuan di Nigeria agar dapat meraih hak-hak dan kesempatannya dalam berbagai sektor. Ketidaksetaraan gender yang akan diteliti pada penelitian ini hanya akan membahas pada bidang ekonomi dan politik. Tahun 2016 dipilih karena berdasarkan data yang diperoleh dari *world bank* partisipasi perempuan di ruang publik masih belum masif dan terdapat banyak kasus ketidaksetaraan gender di Nigeria dan 2020 dipilih karena mulai ada beberapa gerakan aksi perempuan dalam mengatasi bentuk ketidaksetaraan yang mereka rasakan dan di tahun 2020 itu juga terdapat

pandemi yang masih berlangsung kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan Nigeria juga UN Women dalam menghadapi ketidaksetaraan gender dan pandemi. Subjek penelitian ini adalah UN Women. Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan UN Women dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi dan politik terhadap perempuan di Nigeria pada tahun 2016-2020. Nigeria menjadi negara yang dipilih sebagai objek penelitian, karena Nigeria menjadi salah satu negara yang memiliki angka yang tinggi dalam hal ketidaksetaraan gender. Ditambah negara itu memiliki populasi perempuan mencapai setengahnya dari total populasi penduduknya, tetapi tidak semua perempuan mendapatkan hak dan kesempatannya. Melihat hal itu UN Women kemudian hadir untuk membantu mengatasi permasalahan perempuan di sana dengan melakukan pemberdayaan perempuan agar dapat mengurangi ketidaksetaraan gender gender terhadap perempuan di Nigeria.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil dan kajian dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mengkaji dan membandingkan ulang penelitian terdahulu untuk mendapatkan hasil temuan yang terbaru dengan cakupan permasalahan dan objek penelitian yang berbeda. Temuan yang didapatkan dari penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan baru untuk studi hubungan internasional. Berikut beberapa jurnal penelitian terdahulu yang menjadi bahan kajian penelitian ini :

Jurnal yang ditulis oleh Galuh Artika Suri, Hamka, dan Ali Noerzaman pada tahun 2020 dengan judul “Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017. Di dalam jurnal ini dijelaskan mengenai bagaimana peran UN Women dalam menangani kasus kekerasan di Indonesia melalui pemberdayaan, pelatihan, hingga perlindungan kepada wanita-wanita Indonesia (Suri, Hamka, and Noerzaman 2020). Terdapat kesamaan subjek penelitian antara jurnal ini dengan penelitian penulis yang mana keduanya sama-sama mengangkat UN Women sebagai subjek pembahasan, namun memiliki perbedaan dari objek pembahasannya. Jurnal ini mengangkat Indonesia sebagai objeknya, sedangkan penelitian penulis mengangkat Nigeria sebagai objek penelitiannya. *Output* keduanya juga akan jelas berbeda.

Selanjutnya, jurnal lain yang berjudul “Peranan UN Women Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Timor Leste” yang ditulis oleh Zelia Dagraca pada tahun 2017 menjelaskan mengenai bagaimana UN Women menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional yang berfokus pada permasalahan terkait perempuan. Di dalam jurnal ini juga dijelaskan bagaimana UN Women memberikan program-program untuk membantu permasalahan perempuan yang ada di Timor Leste sekaligus menjelaskan apa saja tantangan yang dihadapi oleh UN Women sebagai entitas yang fokus pada permasalahan terkait perempuan (Dagraca Zelia 2017). Cara-cara yang digunakan oleh UN Women dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam ruang politik di dalam jurnal ini akan membantu penulis untuk mengembangkan penelitian penulis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kemi and Jenyo 2016) dalam artikel jurnalnya “*Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls in Nigeria: The Way Forward to National Security*”, laki-laki di Nigeria diperlakukan dengan istimewa, mereka dibebaskan dari beban pekerjaan rumah hingga memiliki hak-hak yang tidak terbatas dalam hal pendidikan, sedangkan perempuan justru diperdagangkan oleh sebagian besar orang tua di sana. Hasil dan temuan dari penelitian Kemi dan Jenyo mengungkapkan kalau kebudayaan dan agama menjadi penyebab utama ketidaksetaraan gender di Nigeria dan ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, seperti pemberdayaan perempuan baik itu dari pendidikan, ekonomi, hingga politik dan juga perlu dibangunnya kesadaran setiap orang terkait pentingnya kesetaraan gender dan manfaatnya pada pembangunan berkelanjutan baik secara nasional maupun global (Kemi and Jenyo 2016). Di dalam jurnal ini belum terdapat pembahasan peran dari aktor *non* negara yang dapat membantu mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender meskipun di dalamnya tertulis beberapa strategi dan rekomendasi yang diberikan oleh penulis terhadap isu ketidaksetaraan gender di Nigeria, maka dari itu penulis mencoba untuk menggunakan data yang ada pada jurnal ini lalu dilengkapi dengan pembahasan mengenai peran organisasi internasional seperti UN Women di dalamnya.

Jurnal yang berjudul “Mengkaji Peran UN Women Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme oleh (Ramadhan and Ma’sumah 2018) membahas mengenai bagaimana peran organisasi internasional seperti United Nations Women dalam

membantu negara-negara anggota untuk mewujudkan kesetaraan gender yang sejalan dengan SDGs kelima (Ramadhan and Ma'sumah 2018). Penelitian ini juga menjelaskan terdapat lima bidang prioritas UN Women. Namun, jurnal ini masih belum memiliki spesifik tempat yang dijadikan objek penelitian, untuk itu penulis akan mengangkat implementasi kebijakan UN Women terhadap Nigeria sebagai objek tempat nya agar menjadi lebih spesifik.

Pada tahun 2020 Jurnal Politik Indonesia dan Global Departemen Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta menerbitkan jurnal “Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017”. Jurnal yang ditulis oleh Galuh Artika Suri, Hamka, dan Ali Noerzaman, menjelaskan bagaimana kontribusi yang diberikan oleh UN Women dalam mengatasi tindakan kekerasan yang ada di Indonesia, melalui tindakan sosialisasi pelayanan perempuan korban kekerasan, membangun mitra dengan lembaga lintas sektor, hingga melakukan advokasi hukum dengan pemerintah mengenai kekerasan perempuan (Suri, Hamka, and Noerzaman 2020). Jurnal yang ditulis oleh Galuh Artika, dkk ini memiliki perbedaan pada studi kasus juga tempat kajian dengan penelitian penulis. Jurnal ini mengambil Indonesia sebagai objek nya, sedangkan penelitian ini mengambil Nigeria sebagai objek yang akan diteliti. Perbedaan ini tentunya akan menghasilkan *output* yang berbeda, sebab dari segi geografis, budaya, lingkungan, ekonomi hingga masyarakat kedua negara ini memiliki perbedaan dan tentunya perbedaan tersebut akan membuat permasalahan yang dikaji pun akan berbeda.

Dari beberapa jurnal tersebut menjelaskan bagaimana kondisi perempuan di Nigeria dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat ketidaksetaraan gender menjadi permasalahan yang masih mengikuti negara tersebut. Penelitian ini akan berbeda dengan beberapa jurnal di atas. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan dari sebuah entitas seperti UN Women dalam mengatasi kasus ketidaksetaraan terhadap wanita di Nigeria melalui pemberdayaan wanita di bidang ekonomi dan politik.

Implementasi kebijakan UN Women sebagai objek kajian penelitian, dengan UN Women sebagai subjek penelitiannya, karena belum ada penelitian sebelumnya yang membahas terkait implementasi kebijakan UN Women dalam mengatasi ketidaksetaraan gender terhadap wanita di Nigeria melalui pemberdayaan wanita. Metode penelitian ini akan menggunakan studi *literatur review* melalui jurnal-jurnal terkait dan informasi dari internet juga buku. Teori yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teori implementasi organisasi internasional dari Jutta Joachim, Bob Reinalda, dan Bertjan Verbeek dengan mengkaji implementasi kebijakan UN Women dalam mengatasi ketidaksetaraan gender terhadap perempuan di Nigeria pada tahun 2016-2020. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam studi hubungan internasional.

1.6 Kerangka Pemikiran

Di dalam penelitian ini penulis mencoba mencari tau bagaimana implementasi UN Women dalam mengatasi ketidaksetaraan gender terhadap perempuan di Nigeria.

Penulis kemudian menggunakan teori organisasi internasional untuk menemukan jawaban atas penelitian ini. Teori organisasi internasional dalam kajian hubungan internasional terdapat banyak definisi nya dari berbagai para ahli. Namun penelitian kali ini akan fokus pada teori implementasi organisasi internasional menurut Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek. Teori ini menyatakan berakhirnya perang dingin dan bangkitnya globalisasi saat itu menjadi pendorong lahirnya organisasi internasional dan juga implementasi dari kebijakannya. Implementasi di sini mengacu pada manifestasi kebijakan internasional yang dibuat kemudian diubah menjadi kebijakan konkret dalam bentuk penerapan peraturan atau regulasi, pembentukan lembaga, hingga pengesahan undang-undang. Implementasi sangat memperhatikan tindakan yang nyata dari suatu negara dalam memenuhi kesepakatan internasional. Seiring dengan berjalannya waktu organisasi internasional terus mengalami peningkatan di tata kelola global. Peningkatan ini telah terlihat di mana-mana. Organisasi internasional pun bukan lagi dianggap sebagai perpanjangan dari sebuah negara ataupun tempat koalisi negara-negara saja, melainkan telah dipandang sebagai aktor dengan hak mereka sendiri yang memainkan peran penting dalam perpolitikan global. Alih-alih hanya menjadi instrumen dari sebuah negara, organisasi internasional dapat mempengaruhi jalannya sebuah peristiwa internasional. Joachim, Bob, dan Verbeek menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam organisasi internasional, yaitu *enforcement*, *managerial*, dan *normative* (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008).

Gambar 1 : Tiga Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional

	<i>Enforcement approach</i>	<i>Management approach</i>	<i>Normative approach</i>
Resources	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports • <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Monitoring</i> on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports • <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Authority and legitimacy</i>

Sumber : *International Organization and Implementation* (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008)

Enforcement approach merupakan pendekatan yang bersifat memaksa negara untuk mematuhi komitmen internasional yang telah disepakati dan sebagai aktor yang rasional negara mempertimbangkan *cost and benefit* yang diperoleh untuk negaranya. Apabila negara tersebut sepakat untuk meratifikasi perjanjian internasional, maka terdapat aturan dan ketentuan yang harus dilakukan oleh negara tersebut. Negara akan terikat dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap perjanjian internasional dapat dipastikan melalui cara-cara koersif seperti pemberian sanksi, seperti sanksi ekonomi, sanksi militer, dan negara juga akan dipermalukan reputasi juga posisinya di tatanan internasional. Sanksi yang diberikan oleh organisasi

internasional terhadap negara yang gagal memenuhi komitmen internasional tersebut akan mengalami penderitaan secara material (Joachim, Reinalda and Verbeek 2007).

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, alih-alih memantau dan memberikan sanksi kepada negara yang melanggar, perspektif ini lebih menekankan pada pemecahan masalah (*problem solving*), peningkatan kapasitas, memantau (*monitoring*) negara tujuan untuk memastikan adanya implementasi perjanjian internasional di negara tersebut. Menurut pendekatan ini apabila negara tersebut mengalami permasalahan dalam mengimplementasikan perjanjian internasionalnya ada beberapa faktor yang bisa dianalisis seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan negara tersebut dan ada pengaruh juga dari perubahan kondisi sosial ekonomi dari negara tersebut dalam jangka waktu yang lama, oleh karena itu pendekatan manajerial melihat kalau penyelesaian hal tersebut bisa dilakukan dengan konsultasi dan usaha kooperatif dari OI dan aktor lainnya. Aktor-aktor menurut pendekatan manajerial adalah pemerintah negara tujuan, masyarakat sipil, organisasi non pemerintah, organisasi PBB yang lain, partai politik, hingga media. Pendekatan ini melihat bahwa di organisasi internasional memiliki peran dalam membantu negara mengembangkan kapasitasnya. Pendekatan manajerial bersifat terbuka dan melihat bahwa keterlibatan aktor-aktor lain atau pihak ketiga memiliki peran penting untuk mewujudkan implementasi komitmen internasional suatu negara, dikarenakan aktor-aktor itu dapat memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada negara yang bersangkutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya (Joachim, Reinalda and Verbeek 2007).

Pendekatan yang ketiga dalam mempengaruhi negara melakukan implementasi perjanjian internasional adalah normatif. Pendekatan ini memiliki sifat dengan berlandaskan kepercayaan. Negara anggota memiliki kepercayaan bahwa organisasi internasional merupakan aktor yang penting dan mempunyai otoritasnya sendiri. Otoritas dalam hal ini, menekankan bahwa organisasi internasional dalam membantu negara mengimplementasikan perjanjian internasional dengan melakukan kontrol informasi (Joachim, Reinalda and Verbeek 2007).

Dari ketiga pendekatan itu nantinya penulis akan menggunakan pendekatan *managerial* untuk membahas implementasi kebijakan UN Women dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan gender terhadap perempuan di Nigeria pada tahun 2016-2020, karena program yang dilakukan oleh UN Women dalam menyelesaikan permasalahan ini cenderung melalui cara-cara kooperatif dengan memberikan bantuan keuangan dan teknis dan bersifat terbuka melalui kerja sama yang di mana hal tersebut merupakan cara-cara yang akan dilakukan oleh organisasi internasional menurut pendekatan manajerial. Metode yang akan digunakan di dalam pendekatan *managerial* adalah *monitoring* oleh UN Women terhadap Nigeria, di bagian ini nantinya akan dilihat bagaimana UN Women bertindak memantau Nigeria melalui laporan yang diserahkan oleh negara tersebut, lalu disertai juga dengan laporan dari aktor NGO dan *expert committee*. Selanjutnya penjelasan terkait program yang dilakukan oleh UN Women lebih kepada pembentukan kerja sama dan pemberian bantuan kepada Nigeria yang menjadi salah satu bentuk implementasi pendekatan manajerial. Penulis juga akan

membahas mengenai kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam kerja sama untuk mengatasi ketidaksetaraan terhadap wanita di Nigeria.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, UN Women memiliki kedudukan sebagai organisasi yang telah melakukan perannya sebagai organisasi internasional yang berfokus pada perempuan dengan melakukan upaya pemberdayaan terhadap perempuan di Nigeria untuk mengatasi ketidaksetaraan gender terhadap perempuan. Dilihat dari konsep implementasi organisasi internasional, melalui pendekatan manajerial (*managerial approach*), UN Women memberikan pelatihan pemberdayaan kepada wanita di Nigeria untuk mengembangkan kapasitasnya di bidang politik dan ekonomi. UN Women juga telah melakukan *monitoring* berdasarkan laporan yang diberikan oleh UN Women dan juga dari laporan NGO yang bekerjasama dengan UN Women. Berdasarkan pendekatan manajerial UN Women telah melakukan kerja sama dengan aktor-aktor NGO yang ada di Nigeria, seperti Kementerian Urusan Wanita Federal dan Negara Bagian, legislator perempuan, *Independent National Electoral Commission* (INEC), *Federation of Muslim Women in Nigeria* (FOWMAN) dan juga dengan beberapa komunitas internasional seperti, ECOWAS, di Nigeria untuk mengkoordinasikan pemberdayaan wanita Nigeria. UN Women juga memberikan bantuan keuangan untuk mendukung program pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik. Selain itu, UN Women memberikan bantuan teknis dengan mengadakan *workshop* seminar pemberdayaan wanita di ranah politik dan ekonomi, di sana para wanita mendapatkan pelatihan dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan

kapasitasnya dalam bidang tersebut. Adanya *annual report* terkait *progress* kerjasama UN Women dan Pemerintah Nigeria dalam menjalankan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas perempuan di Nigeria juga merupakan implementasi dari pendekatan manajerial.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena sifat metode kualitatif ini yang elaboratif maka dapat membantu penulis dalam meneliti dan mengeksplorasi informasi terkait topik pembahasan penelitian secara lebih dalam. Selain itu pada penelitian ini mayoritas menggunakan data dalam bentuk *non* angka sehingga penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai metode yang tepat dalam penelitian ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini didapatkan dari rumusan masalah yang mana UN Women menjadi subjek penelitian sedangkan objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan UN Women dalam mengatasi ketidaksetaraan gender terhadap perempuan Nigeria pada tahun 2016-2020.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi literatur. Studi literatur merupakan metode pengumpulan informasi yang didapatkan untuk

mendukung penelitian ini. Informasi yang didapatkan berasal dari artikel jurnal, berita, *website*, buku, dan informasi di internet.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak Maret 2022. Penelitian dimulai dari mencari berbagai informasi terkait judul penelitian, baik dari jurnal, buku, artikel, situs resmi UN Women dan Nigeria, hingga penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah mendapatkan berbagai informasi dari sumber tersebut penulis memilah data-data yang diperoleh agar sesuai dengan kebutuhan penelitian dan untuk menemukan data yang lebih spesifik. Setelah mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian, kemudian penulis mulai menulis kerangka pemikiran juga menganalisis penelitian menggunakan teori yang sesuai dengan penelitian. Kemudian, di bagian akhir penulisan ditemukan hipotesis dari penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang akan memudahkan penjelasan penelitian. Sistematika penelitian ini terdiri dari :

1. BAB I : Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis (argumen sementara), metodologi penelitian yang di dalamnya terdapat jenis penelitian, subjek dan objek, metode pengumpulan data, dan proses penelitian, di akhir bab 1 terdapat sistematika penelitian yang menjelaskan mengenai penjelasan semua bab penelitian.

2. Bab II : Berisikan penjelasan mengenai profil organisasi UN Women dan kehadiran UN Women di Nigeria, kondisi perempuan dan ketidaksetaraan gender yang ada di Nigeria, dan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh UN Women di Nigeria.

3. BAB III : Implementasi kebijakan UN Women dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan politik terhadap perempuan di Nigeria

4. BAB IV : Berisikan kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

UN WOMEN DAN KETIDAKSETARAAN GENDER DI BIDANG EKONOMI, POLITIK TERHADAP PEREMPUAN DI NIGERIA

Pada bab 2 tulisan ini membahas mengenai profil organisasi UN Women dan pemetaan masalah mengenai kondisi para perempuan di Nigeria di bidang politik dan ekonomi. Bab ini diperlukan untuk menjadi langkah awal dalam memetakan masalah yang dirasakan oleh perempuan Nigeria guna dijadikan landasan dalam melihat penyelesaian masalah yang ada di bab selanjutnya yaitu peran UN Women dalam menangani ketidaksetaraan gender pada bidang ekonomi dan politik di Nigeria. Di dalam bab ini dijelaskan mengenai ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi dan politik dan apa saja yang menjadi faktor pendorong adanya ketidaksetaraan gender tersebut dari tahun 2016 hingga 2020.

2.1. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) sebagai Organisasi Internasional

2.1.1 Sejarah UN Women

Pada bulan Juli 2010, anggota-anggota United Nations berkumpul dan mengadopsi resolusi majelis umum 64/289 yang kemudian memutuskan untuk mendirikan entitas baru yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan entitas tersebut dinamakan *United Nations Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women* (UN Women 2021). Beberapa bulan setelah pembentukan UN Women tepatnya pada tanggal 14 September 2010 mantan Presiden Chile yakni Michelle Bachelet dipilih sebagai direktur eksekutif pertama UN Women.

Terpilih nya Michelle Bachelet sebagai ketua mendapatkan dukungan dan sambutan dari berbagai negara (UN Women 2010). Sebelum terbentuknya UN Women, ada sebuah badan khusus dari PBB yang dibuat untuk berfokus pada permasalahan perempuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan, badan tersebut bernama Komisi Status Wanita. Komisi Status Wanita itu kemudian membentuk konvensi yang bernama CEDAW. Konvensi CEDAW ini adalah salah satu pedoman UN Women bekerjasama dengan pemerintah, lembaga pemberdayaan domestik, masyarakat sipil, dan aktor lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan merancang kebijakan, hukum, layanan dan juga program terkait perempuan (Ramadhan Iqbal 2018, Hal.4-5). Dalam mendukung negara anggotanya untuk mewujudkan program- program terkait pengembangan dan pemberdayaan perempuan UN Women memiliki dana operasional. Biaya tersebut dialokasikan kepada badan-badan pemerintah negara tujuan.

Selain itu, UN Women mempunyai beberapa fokus bidang prioritas (UN Women n.d), yang pertama adalah *increasing women's leadership and participation*, ini tentu berkaitan erat dengan kesetaraan gender mengingat budaya patriarki masih sangat kental di beberapa negara sehingga partisipasi perempuan di bidang politik sangat kurang dan bahkan ada yang dibatasi. Untuk itu perlu adanya program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan dapat berpartisipasi sebagai *agen of change* di dalam bidang politik. Fokus kedua adalah *ending violence against women* terkait dengan masih banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban karena kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh lingkungan dan sistem negara yang bersangkutan. Di dalam perjanjian internasional CEDAW

dikatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk bebas dari semua kekerasan dan ketidaksetaraan. Untuk memberikan kehidupan yang bebas dari ketidaksetaraan dan tindakan diskriminatif, UN Women mendukung penuh terhadap Majelis Umum PBB, Komisi Status Perempuan, dan pemerintah untuk melakukan reformasi hukum dan undang-undang yang non diskriminatif terhadap perempuan sehingga dapat mengakhiri ketidaksetaraan. Fokus yang ketiga adalah *engaging women in all aspects of peace and security processes*, karena perempuan kerap kali menjadi korban dari konflik maupun perang, maka dari itu UN Women ingin melibatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Fokus keempat adalah *enhancing women's economic empowerment* di mana perempuan sangat berkontribusi dalam ekonomi, bisnis, bahkan pertanian sebagai pengusaha maupun karyawan, namun ini tidak sejalan dengan upah perempuan yang cenderung lebih kecil dan kehidupan perempuan tidak menjadi lebih baik. Perempuan sering sekali ditempatkan pada pekerjaan yang tidak aman yang membuat mereka secara tidak langsung terjebak pada kondisi kemiskinan, eksploitasi, dan diskriminasi. Diperlukan investasi pemberdayaan ekonomi perempuan dengan memberikan ruang untuk perempuan berkontribusi dalam sektor ekonom agar menuju pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif (UN Women, n.d.). Untuk mewujudkan kesetaraan dalam sektor ekonomi, UN Women bekerjasama dengan beberapa mitra nasional hingga internasional dan juga mendukung komitmen internasional yang bertujuan dalam pemberdayaan ekonomi seperti CEDAW, *Beijing Platform for Action*. (UN Women n.d.).

2.1.2 Masuk nya UN Women di Nigeria

UN Women hadir di Nigeria pada tahun 2012. Kehadiran UN Women di Nigeria merupakan bentuk implementasi kebijakan norma-norma UN Women berdasarkan empat bidang prioritasnya. Sebagai organisasi internasional yang memiliki norms dalam badan strukturnya, UN Women memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan dan intervensi program kepada negara tujuan untuk membantu mereka keluar dari permasalahan terkait ketidaksetaraan gender. Di tambah Nigeria telah meratifikasi konvensi CEDAW pada tahun 1985 yang kemudian menjadi sebab UN Women datang ke Nigeria untuk membantu pemerintah Nigeria mengimplementasi komitmen internasionalnya (Ekhatu 2015). UN Women memiliki strategi untuk mewujudkan *Gender Equality and Women Empowerment* (GEWE). UN Women beserta mitra nya melaksanakan program pemberdayaan kepada para perempuan untuk menghilangkan segala bentuk ketidaksetaraan gender dan permasalahan yang dihadapi oleh para perempuan Nigeria dengan harapan akan memajukan kesetaraan gender juga peningkatan kapasitas para perempuan di Nigeria (UN Women n.d.).

Di Nigeria, UN Women memiliki strategi yang fokus untuk membawa peningkatan keberadaan posisi perempuan pada kepemimpinan dan partisipasi politik melalui gerakan politik perempuan juga meningkatkan gerakan ekonomi perempuan dengan meningkatkan kapasitas perempuan di bidang ekonomi (UN Women 2020). Dalam melakukan program pemberdayaan, UN Women bekerjasama dengan beberapa aktor domestik yang ada di Nigeria, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga

lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan. UN Women juga berupaya untuk membawa perubahan pada hukum Nigeria yang tidak memadai dan terbatas dalam mendukung perempuan. UN Women mendukung penuh pembangunan nasional pemerintah Nigeria yang memprioritaskan pemberdayaan kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan serta berkontribusi dalam semua bidang termasuk ekonomi, karena hal tersebut sejalan dengan bidang kerja utama UN Women.

Selama melakukan tugasnya UN Women Nigeria bekerjasama dengan banyak mitra, ada yang berasal dari struktur PBB lainnya seperti *Food and Agriculture Organization* (FAO), UNDP, *International Labour Organization* (ILO), WFP, UNIDO, UNFPA, UNICEF, UNHCR, dan IOM. Lalu, ada yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat Nigeria seperti *Search for Common Grounds* (SCG), *Women's Advocacy and Research Development Committee* (WARDC), *National Democratic Institute* (NDI), *International Republican Institute* (IRI), Nigeria Women Trust Fund (NWTF), *Center for Democracy Development* (CDD), *Women Situation Room-Nigeria*, WANEP, IANSA, CEPAN, CWEEN perempuan dan asosiasi bisnis, dan juga berkolaborasi dengan *Chartered Institute of Purchasing and Supply* (CIPSMN) agar dapat meningkatkan kapasitas perempuan, hingga bekerjasama dengan Pemerintah Nigeria seperti Kementerian Federal Urusan Perempuan, Kementerian Pertanian, Kementerian Anggaran dan Perencanaan, Kementerian Keuangan dan Kehakiman; Pemerintah Negara Bagian Borno, Yobe, Kaduna, Lagos, Benue dan Bauchi, Komisi Pemilihan Umum Nasional Independen (INEC), Dewan Perwakilan Rakyat, Komite Komite

Penasihat Antar-Partai, Institut Perdamaian dan Resolusi Konflik. Majelis Legislatif, Kementerian Urusan Wanita Nigeria, hingga bekerjasama dengan Bank Sentral Nigeria terkait akses pembiayaan dalam merealisasikan program UN Women. UN Women Nigeria juga mempromosikan undang-undang juga kebijakan yang akan memfasilitasi akses para perempuan untuk dapat terlibat dalam kegiatan produktif serta terlibat dalam kegiatan agribisnis. UN Women juga berupaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap informasi, komunikasi, dan teknologi juga berusaha menginovasi koperasi petani perempuan dan asosiasi agribisnis (UN Women Country Portfolio Evaluation in Nigeria 2022).

2.2 Ketidaksetaraan Gender Terhadap Perempuan di Nigeria

Ketidaksetaraan gender merupakan sebuah hal atau fenomena yang mana menghalangi kapabilitas salah satu gender. Ketidaksetaraan gender kebanyakan dirasakan oleh perempuan di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan politik. (UN Women n.d.). Adanya ketidaksetaraan yang menindas, menjadi penghalang para perempuan untuk berpartisipasi dalam kesetaraan bersama laki-laki di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lainnya (World Bank 2019). Lahirnya ketidaksetaraan gender ini bisa disebabkan banyak faktor, baik lingkungan internal maupun eksternal seperti pemerintah dan sistem lingkungan yang *bias* dan patriarki. Program yang terkait dengan pemberdayaan bisa menjadi salah satu langkah yang solutif untuk meminimalisir adanya ketidaksetaraan gender terhadap perempuan.

Setiap negara memiliki permasalahan ketidaksetaraan gender termasuk Republik Nigeria. Nigeria merupakan negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas perempuan dari total populasi keseluruhan. Negara ini memiliki tradisi budaya masyarakat patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Praktik budaya patriarki telah ada di seluruh negeri ini selama bertahun-tahun, sehingga menjadi penghalang bagi perempuan untuk berkembang. Adat istiadat, budaya, tradisi, dan juga agama telah menurunkan perempuan di Afrika khususnya Nigeria ke dalam posisi inferior, sehingga membatasi hak mereka atas kesetaraan dan kebebasan dari tindakan diskriminatif (Offiong, Eyo, and Offiong 2021).

Dalam masyarakat tradisional Nigeria, perempuan banyak tidak dianggap atau diikutsertakan ketika dalam pengambilan keputusan baik di pertemuan ruang publik hingga dalam konteks internal keluarga dan rumah. Laki-laki memegang kekuasaan dan mendominasi kepemimpinan politik, kontrol ekonomi, dan memiliki hak sosial yang istimewa. Hukum dan budaya ditetapkan oleh laki-laki tanpa masukan dari perempuan yang kemudian menyebabkan kepentingan perempuan kurang terwakilkan. Hal tersebut berlaku pada lapisan ekonomi, politik, dan sosial yang kemudian menyebabkan adanya tindakan diskriminatif di Nigeria (Offiong, Eyo, and Offiong 2021).

2.2.1 Bidang Ekonomi

Ketidaksetaraan gender pada bidang ekonomi dirasakan oleh perempuan Nigeria dengan sedikitnya partisipasi perempuan dalam lapangan pekerjaan. Situasi

yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki di bidang ketenagakerjaan menjadi beban persoalan. Secara ekonomi, para perempuan di Nigeria diremehkan dan diabaikan kekuatannya. Mereka mayoritas disalurkan ke pekerjaan jenjang terbawah seperti di sektor pertanian, pekerjaan jasa dan rumah tangga. Di sektor pertanian terdapat sekitar 60%-80% perempuan yang mendominasi, mereka melakukan pengolahan pada kacang-kacangan hingga sayuran. Para perempuan yang bekerja di sektor pertanian ini memiliki akses yang sulit terkait pinjaman keuangan untuk membeli bibit dan pupuk juga dalam layanan penyuluhan mengenai agrikultur, sehingga hal tersebut dapat menghambat produksi pangan dan ketahanan pangan juga kesejahteraan para petani perempuan (Islamic Development Bank 2019).

Berdasarkan laporan *global gender gap* yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum* pada tahun 2016, partisipasi perempuan di ke 84 dari 144 negara dan partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 49 poin dari 100 poin, sedangkan laki-laki sedikit lebih banyak yaitu 64 poin. Perbedaan ini menyebabkan adanya perbedaan pemasukan dan gaji yang diterima oleh perempuan dan laki-laki (World Economic Forum 2016).

Gambar 1. Jumlah Partisipasi Perempuan Nigeria di Bidang Ekonomi Tahun

2017

COUNTRY SCORE CARD						
	rank	score	avg	female	male	f/m
Economic participation and opportunity	37	0.728	0.585			
Labour force participation	85	0.760	0.667	48.8	64.2	0.76
Wage equality for similar work (survey)	17	0.763	0.634			0.76
Estimated earned income (PPP, US\$)	53	0.651	0.509	4,612	7,089	0.65
Legislators, senior officials and managers	-	-	-	-	-	-
Professional and technical workers	-	-	-	-	-	-

Sumber : *World Economic Forum 2017*

Berdasarkan data *Gender Gap Report (GGR)* oleh *World Economic Forum* tahun 2017 di atas, angkatan kerja perempuan mendapatkan skor 48.8 dari 10 poin terbilang sedikit dibandingkan dengan laki-laki yang mendapatkan 64.2 poin. Hal itu berefek kepada estimasi pemasukan yang dihasilkan, data estimasi pemasukan indikator nya diperoleh dari upah relatif perempuan dan laki-laki, PDB negara. Dilihat dari gambar di atas pemasukan perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Lembaga Ketenagakerjaan Nigeria mengungkapkan, pada tahun 2017 jumlah pengangguran di Nigeria mengalami kenaikan dan ini dikarenakan rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, keterwakilan perempuan dalam pekerjaan yang tidak tetap, ditambah dengan gaji yang rendah.

Pada tabel satu di bawah ini dapat dilihat bagaimana tingkat partisipasi perempuan dalam beberapa sektor pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki dengan persentase perempuan 49.1% dan laki-laki 52.9%. Perempuan lebih

banyak masuk pada sektor pekerjaan paruh waktu berupa jasa dan rumah tangga dengan penghasilan yang rendah. Berdasarkan *gender gap report* tahun 2018 terdapat 6,5% pengangguran berasal dari perempuan dan *gap* antara laki-laki dan perempuan cukup jauh sebesar 0,5% (The World Economic Forum 2018).

Tabel 1. Ketenagakerjaan dan Kegiatan Ekonomi Nigeria

Kategori	Female (%)	Male (%)
Pengangguran	6,5	6.0
Paruh Waktu	14.1	8.9
Ketenagakerjaan	49.1	52.9
Rata-rata penghasilan bulanan	391.0	453.4
Tingkat Partisipasi angkatan kerja	48.8	56.3

Sumber : *Gender Gap Report and ILO 2018*

Berdasarkan data dari *World Bank*, jumlah angkatan kerja perempuan Nigeria sejak tahun 2016 hingga 2020 jumlah angkatan kerja perempuan di Nigeria mengalami kenaikan sebelumnya di tahun 2016 sempat mengalami penurunan dan

berada di angka 48% dari jumlah populasi total secara perlahan kemudian naik seperti yang tampak pada gambar di bawah ini (World Bank, n.d.).

Gambar 2. Angkatan Kerja Perempuan di Nigeria dari tahun 2016-2019



Sumber : *World Bank*

Penurunan angkatan kerja perempuan dan kurang bagusnya kondisi perekonomian perempuan di Nigeria pada gambar di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat ditarik secara garis besar, pertama faktor pendidikan. Terdapat sebanyak 49% perempuan di Nigeria yang masih belum difasilitasi pendidikan menengah ke atas, sehingga kualitas sumber daya manusia nya tidak bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan ekonomi mereka (Enhancing Financial Innovation and Access 2020). Kedua, kondisi negara Nigeria yang memiliki budaya masyarakat patriarki juga mendorong rendahnya perekonomian perempuan di Nigeria, budaya patriarki tersebut telah membatasi perempuan pada jenis pekerjaan tertentu, memiliki gaji lebih rendah dibandingkan

dengan laki-laki bahkan masih ada perempuan yang tidak dibayar atas pekerjaan mereka, hingga mempunyai otonomi terbatas dalam pengambilan keputusan keuangan rumah tangga, kesehatan, dan sebagainya (Enhancing Financial Innovation and Access 2020). Ketiga, adanya ketimpangan pengetahuan dan informasi antara laki-laki dan perempuan di Nigeria berdampak negatif pada akses peluang ekonomi. Perempuan terjebak pada sektor pekerjaan dengan produktivitas rendah dalam komoditas pertanian, mereka hanya bisa menjadi produsen skala kecil seperti beras, tomat, jagung, dan singkong. Petani perempuan tidak dapat memproduksi dengan skala besar karena kurangnya akses terhadap informasi benih, pupuk, proses mekanisme, dan pengetahuan terkait praktik pertanian yang baik (World Bank 2018).

Kehadiran masyarakat yang patriarki sering sekali dikarenakan oleh kepercayaan mereka yang beragam. Di Nigeria Utara khususnya Hausland, pengasingan perempuan dari ruang publik menjadi sebuah standar penilaian untuk kesuksesan dan kemandirian ekonomi seorang laki-laki. Laki-laki dianggap cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga istrinya tidak perlu repot untuk bekerja keluar rumah dan sebaliknya perempuan yang diizinkan bekerja mencerminkan kegagalan ekonomi laki-laki (Zakaria 2001).

Namun di tahun 2020 Pengaruh covid membuat ketidaksetaraan gender pada bidang ekonomi mengancam perempuan Nigeria untuk *survived* karena mereka banyak yang kehilangan pekerjaan terutama perempuan yang bekerja di bidang bisnis. Bisnis mereka banyak yang jatuh, sehingga pendapatan mereka berkurang. Tingkat angkatan kerja perempuan juga berkurang.

2.2.2 Bidang Politik

Ketidaksetaraan gender pada bidang politik yang dirasakan oleh perempuan di Nigeria ditandai dengan sedikitnya keterlibatan perempuan Nigeria di ruang parlemen. Akses mereka untuk memasuki dunia politik tidak sebebaskan laki-laki. Selain keterlibatan perempuan yang sedikit, terdapat juga undang-undang yang kurang ramah dengan isu-isu perempuan yang bisa berimplikasi kepada permasalahan di bidang lain menyangkut perempuan dan haknya. Selain dua hal tadi, perempuan di Nigeria tidak banyak yang memiliki pengetahuan mengenai dunia politik, maka dari itu banyak dari mereka tidak mengetahui bahwa perempuan juga bisa bersuara dan menyuarkan aspirasi juga kondisi mereka di ruang publik. Hal tersebutlah yang menyebabkan dunia politik di Nigeria banyak didominasi oleh laki-laki. Diskriminasi kuota perempuan dalam bidang politik sangat tampak jelas di Nigeria. Mereka diharuskan untuk mengikuti semua aturan yang bahkan tidak memiliki *concern* terhadap isu perempuan.

Nigeria saat ini belum mencapai paritas gender dalam representasi untuk semua tingkatan dibandingkan dengan negara-negara Afrika yang lain. Dibandingkan dengan negara Afrika yang lain, saat ini perwakilan perempuan di kabinet eksekutif Nigeria menjadi yang terendah (Enhancing Financial Innovation and Access 2020). Partisipasi perempuan Nigeria di bidang politik bahkan tidak mencapai 50% dari total populasi penduduknya (Nwabunkeonye 2014).

Berdasarkan data yang diperoleh dari *global gender gap report* yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum* di tahun 2016, di dalam indeks *political*

empowerment, keterlibatan perempuan di dalam parlemen berada pada ranking 136 dari 144 negara. Partisipasi angkatan pekerja perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki dan tahun sebelumnya, yaitu hanya mencapai 6 poin dari skala 1-100, hal itu berbanding terbalik dengan laki-laki yang mencapai hampir setengahnya yaitu 94 poin dari skala 1-100 (World Economic Forum 2016).

Di tahun 2017 partisipasi perempuan di parlemen sangat sedikit bahkan hampir 94% didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan *gender gap report* dari WEF, partisipasi perempuan di parlemen hanya menyentuh 5.6% (World Economic Forum 2017). Kemudian di tahun 2018, partisipasi perempuan di parlemen tidak mengalami perubahan tetap 5.6% dan angka ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan laki-laki yang menyentuh angka 94.4% (World Economic Forum 2018).

Berdasarkan laporan UN Women (UN Women n.d.) pada tahun 2019 jumlah partisipasi perempuan dalam politik di Nigeria mencapai sebanyak 3.1 % dari 6.5% jumlah kuota perempuan di parlemen. Angka tersebut dikatakan menurun sebab pada tahun pemilu 2015 persentase partisipasi perempuan dalam politik Nigeria sebanyak 5.6% dari 6.5% total kuota perempuan di parlemen (UN Women n.d.). Di tahun 2019 Nigeria melakukan pemilihan legislatif dan Senat Nigeria memutuskan memilih 8 (7,34%) dari 109 total anggota keseluruhan, kemudian DPR Nigeria hanya memilih 13 orang perempuan dari 360 anggota keseluruhan dan angka-angka tersebut sangat jauh di bawah rata-rata angka yang ditetapkan secara global untuk melibatkan 26,1% perempuan di parlemen agar mencapai paritas gender (Inter-Parliamentary Union 2022). Di tahun 2020 partisipasi perempuan di parlemen mengalami penurunan yang

signifikan dengan persentase 3.4% dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 96.4%. *Gap* antara keduanya sangat jauh. Penurunan partisipasi perempuan di tahun 2020 ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 (UN Women 2020).

Representasi perempuan di bidang politik di Nigeria yang jumlahnya sedikit sebenarnya berasal dari beberapa faktor yang kompleks, baik masalah internal atau pribadi hingga eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi sedikitnya partisipasi perempuan di bidang politik diantaranya level pendidikan perempuan Nigeria yang masih kurang memiliki keterampilan dalam berbicara di publik, strategi kampanye yang kurang maksimal, kurangnya keterampilan advokasi dan negosiasi, oleh karena itu sedikit perempuan yang memenuhi syarat untuk maju dalam pemilihan posisi politik, karena mereka belum menyadari apa saja yang perlu dipersiapkan dan dibutuhkan ketika hendak bersaing dan memenangkan suara dalam politik. Untuk masuk ke dalam perpolitikan di Nigeria juga membutuhkan keterlibatan keuangan dan dukungan finansial yang besar dan hal ini menjadi faktor penghambat perempuan di Nigeria untuk terlibat dalam dunia politik. Sebagian dari mereka masih banyak berada pada posisi finansial yang menyedihkan, karena hampir semua perempuan Nigeria hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga sedikit sekali perempuan yang tertarik untuk terjun ke dalam dunia politik (Nwabunkeonye 2014). Ditambah lingkungan politik yang kurang sehat disebabkan adanya intimidasi dan serangan fisik yang ditujukan untuk perempuan Nigeria juga menipiskan jumlah partisipasi perempuan di bidang politik (Enhancing Financial Innovation and Access 2020).

Faktor eksternal yang mempengaruhi sedikitnya partisipasi perempuan di bidang politik, yaitu kriteria yang ditetapkan oleh sistem yang *bias* untuk jenis kelamin tertentu, sehingga membuat perempuan memiliki kesempatan yang kecil untuk berpartisipasi. Adanya sistem yang *bias* ini disebabkan budaya patriarki dan stigmatisasi masyarakat yang menganggap perempuan yang terjun ke dalam dunia politik sebagai orang yang tidak tau malu dan *promiscuous*. Selain sistem yang *bias*, lingkungan politik yang kurang sehat karena tingginya kekerasan dalam politik di Nigeria dengan melakukan serangan fisik dan intimidasi yang ditujukan kepada perempuan membuat minat mereka untuk berpartisipasi dalam politik menjadi berkurang (Enhancing Financial Innovation and Access 2020).

Berdasarkan laporan *Global Gender Gap Report (GGGR)* tahun 2020 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF), menunjukkan Nigeria berada pada posisi 146 dari 153 negara dengan skor 0.032 dari skala 0-1 partisipasi perempuan di bidang politik (World Economic Forum 2020). Hal itu menunjukkan masih sedikitnya minat perempuan Nigeria untuk terlibat di dalam sektor politik. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan solusi yang sifatnya solutif. Program pemberdayaan perempuan dengan gerakan-gerakan politik perempuan menjadi salah satu cara untuk membangkitkan minat perempuan untuk masuk ke dalam dunia perpolitikan dan membebaskan perempuan Nigeria dari ketidakberdayaan politik agar mencapai kesetaraan gender dan hak-hak mereka.

Tabel 2. Permasalahan Perempuan di Nigeria di Bidang Ekonomi dan Politik

Ekonomi	Politik
Gaji yang rendah	Pembatasan kuota partisipasi wanita di ranah politik
Kemiskinan	Pengetahuan ilmu politik yang masih kurang
Akses pekerjaan yang sulit	Kurang kesadaran untuk terlibat dalam bidang politik
Peluang berbisnis yang rendah	

Sumber: (United Nations Women 2020)

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UN WOMEN DALAM MENGATASI KETIDAKSETARAAN GENDER DI BIDANG EKONOMI DAN POLITIK WANITA DI NIGERIA

Bab 3 ini merupakan bab utama dari keseluruhan penelitian ini. Di dalam bab 3 ini akan membahas mengenai analisis bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh UN Women dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi dan politik terhadap perempuan di Nigeria dari tahun 2016-2020 melalui program pemberdayaan di bidang ekonomi dan politik. Teori implementasi organisasi internasional dengan pendekatan manajerial akan digunakan sebagai pisau analisis implementasi kebijakan UN Women dalam mengatasi ketidaksetaraan gender terhadap perempuan di Nigeria di bidang ekonomi dan politik. Implementasi sangat memperhatikan tindakan yang nyata dari suatu negara dalam memenuhi kesepakatan internasional dan implementasi ini merupakan fenomena yang dinamis karena menggunakan sumber daya dari aktor lain yang terlibat. Aktor seperti *International Organization (IO)* merupakan sumber daya sebuah negara untuk membantu mewujudkan implementasi kesepakatan internasional. Organisasi internasional nantinya diminta untuk membantu dan melaporkan tindakan apa saja yang harus diambil oleh negara. Organisasi internasional bertanggung jawab atas implementasi bersama dengan pemerintah yang merupakan aktor penting dalam realisasi implementasi di lapangan. Selain organisasi internasional, ada aktor lain yang juga memiliki peran dalam proses implementasi, seperti organisasi antar pemerintah, organisasi non pemerintah, atau badan khusus yang fokus pada bidang tertentu. Semua

aktor tersebut memiliki peran masing-masing dan menjadi bagian dari implementasi. Untuk melihat implementasi berhasil atau gagal ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu *enforcement*, *managerial*, dan *normative* (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2007).

Namun, di dalam penelitian ini hanya akan menggunakan pendekatan *managerial*. Pendekatan manajerial menekankan bahwa adanya kepatuhan dalam sebuah perjanjian internasional itu berasal dari interaksi antara aktor yang memiliki kesamaan tujuan untuk mewujudkan sebuah keseimbangan dan keuntungan yang sama. Pendekatan ini juga meyakini kalau terbuka pada kerja sama dengan aktor yang memiliki kesamaan tujuan dalam mewujudkan sebuah keseimbangan dan memperoleh keuntungan yang sama dapat memberikan efek kepatuhan pada perjanjian internasional. Pendekatan manajerial juga melihat adanya metode lain untuk membuat aktor patuh pada perjanjian internasional seperti melalui cara *monitoring* (pengawasan) dan perlu adanya transparansi yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Dari penelitian ini penulis menemukan UN Women telah melakukan implementasi kebijakannya sebagai organisasi internasional dan menerapkan nilai-nilai pendekatan *managerial* dari konsep implementasi organisasi internasional menurut Jutta Joachim, Bob Reinalda, Bertjan Verbeek (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2007).

Oleh karena itu, di dalam bab 3 ini penulis akan menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan UN Women sebagai organisasi internasional dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di Nigeria di bidang ekonomi dan politik dari rentang tahun 2016-2020 berdasarkan teori implementasi organisasi internasional dengan pendekatan

manajerial seperti *monitoring* (pengawasan), bekerjasama dengan aktor lain, pengembangan kapasitas, dan bantuan keuangan juga bantuan teknis kepada negara. Dengan adanya analisis pada bab ini akan memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini.

3.1 *Monitoring* oleh UN Women di Bidang Politik dan Ekonomi Terhadap Perempuan di Nigeria Tahun 2016-2020

Sebagai organisasi internasional yang memiliki fokus pada pengentasan semua bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan gender di dunia, UN Women tentu melakukan banyak cara untuk menyelesaikan hal tersebut, termasuk melakukan pengawasan kepada negara anggota salah satunya Nigeria. Menurut teori implementasi organisasi internasional Jutta Joachim, Reinalda, dan Verbeek, pemantauan yang dilakukan oleh OI kepada negara tujuan memiliki tujuan untuk melihat bagaimana negara tujuan tadi melaksanakan implementasi komitmen internasional yang telah disepakati melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya nilai-nilai dari perjanjian internasional tersebut. *Monitoring* yang dilakukan oleh OI bisa dilakukan dengan banyak cara, seperti pemantauan melalui laporan negara tujuan, pemantauan melalui aktor-aktor lain yang terlibat dalam proses implementasi perjanjian internasional, dan terakhir bisa melalui komite ahli yang juga bekerjasama dengan OI (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008).

3.1.1 Monitoring Berdasarkan Laporan Negara Nigeria

UN Women melakukan pengawasan terhadap kondisi perempuan di Nigeria untuk mengetahui bagaimana proses implementasi komitmen Nigeria dalam mengurangi angka ketidaksetaraan gender di sana. Nigeria telah meratifikasi konvensi CEDAW sejak tahun 1985 dan protokol opsional nya pada tahun 2004 yang di mana konvensi ini merupakan program dari struktur bagian UN Women, yaitu Komisi Status Wanita. Konvensi ini dibuat dengan tujuan untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dengan setujunya Nigeria untuk meratifikasi konvensi tersebut, maka Nigeria harus melaporkan kondisi terkait perempuan di negaranya dalam bentuk laporan tahunan. Kemudian di tahun 1986 untuk pertama kalinya Nigeria menyerahkan laporan periodik atau laporan rutin kepada komite CEDAW, lalu setelah Komisi Status Wanita tergabung dalam struktur UN Women, Nigeria kembali menyerahkan laporan dan kepada komite CEDAW di tahun 2016-2020. Laporan tersebut memuat data terkait keterlibatan perempuan Nigeria di bidang politik dan ekonomi, tantangan apa saja yang dihadapi oleh perempuan Nigeria, hingga data-data mengenai ketidaksetaraan dan permasalahan perempuan Nigeria (Civil Resource Development and Documentation Centre 2016).

UN Women mulai melakukan pemantauan dengan mengawasi pengumpulan data lalu disatukan semua informasi yang dibutuhkan untuk proses pemantauan dan pelaporan proyek dan program di mulai dari proses perencanaan hingga tahap evaluasi. Setelahnya dilanjutkan dengan memantau pelaksanaan kegiatan apa saja dan pengeluaran dana mitra dialokasikan ke mana saja. Laporan yang diserahkan oleh

Nigeria kepada UN Women tadi akan menjadi dasar langkah UN Women dalam menyusun program apa saja yang akan dilakukan oleh UN Women terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Nigeria dan dapat melakukan pencegahan agar ketidaksetaraan gender terhadap perempuan Nigeria tidak menjadi masif. Dalam pelaksanaan program nya UN Women tetap melakukan pemantauan dan memberikan masukan dari hasil kegiatan pemberdayaan ke dalam laporan *Country Office*. UN Women memastikan penyampaian masukan dan evaluasi dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan informasi yang didapatkan dan dikumpulkan tadi akan disampaikan pada pemerintah terkait (UN Women Africa n.d.).

Penyerahan laporan merupakan langkah UN Women untuk mengawasi pemantauan program pemberdayaan politik perempuan dan hal tersebut diwujudkan dalam pembentukan program dari UN Women dengan melakukan pengembangan kapasitas calon perempuan yang ingin terjun pada dunia politik dengan memberikan pelatihan *public speaking*, advokasi, kampanye, pengawasan layanan untuk berkonsultasi dalam hal politik, pengembangan digital ekonomi terhadap perempuan dengan memberikan pelatihan, menggunakan *smartphone* dan sosial media untuk memperluas jangkauan ekonomi perempuan, hingga memberikan bantuan keuangan untuk mendukung kapasitas ekonomi perempuan.

UN Women juga melakukan upaya pemantauan melalui pembentukan laporan setiap tahunnya terhadap negara tujuan dengan membuat *Annual Country Reports* (ACR). Laporan tersebut berisi mengenai apa saja yang dilakukan oleh UN Women selama satu tahun secara akurat dan terbuka. Laporan tersebut merupakan bentuk

transparansi UN Women sebagai organisasi internasional yang menangani negara tujuannya untuk mengatasi permasalahan (UN Women Annual Report 2020).

3.1.2 *Monitoring* oleh UN Women Berdasarkan Laporan Mitra Kerja Sama

Selain melalui *annual report* dari negara tujuan, proses pemantauan yang dilakukan oleh organisasi internasional menurut pendekatan manajerial adalah pengawasan oleh organisasi internasional dalam hal ini UN Women melakukan kerja sama dengan orang ketiga yang menjadi perwakilan UN Women dalam melakukan pengawasan terhadap negara tujuan. Orang ketiga ini merupakan NGO lokal maupun internasional yang bekerjasama dengan UN Women. UN Women mengelola koordinasi dengan mitra lain untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan, lalu UN Women juga memberikan panduan substansial kepada para mitra dalam menetapkan indikator pencapaian hasil. UN Women juga melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas dan mendukung mitra melalui pendampingan, pelatihan, dan pembelajaran.

Ada beberapa mitra yang bekerjasama dengan UN Women dalam melakukan pengawasan terhadap Nigeria, seperti WISCAR yang merupakan organisasi non-pemerintah Nigeria yang memiliki fokus pada pengembangan dan pemberdayaan profesional wanita untuk berkontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan di Afrika. WISCAR sendiri telah bergabung dengan UN Women untuk meningkatkan *Women Empowerment Principles* (WEPs) di tempat kerja. WISCAR membantu UN Women untuk mengawasi dan memastikan implementasi terbentuknya WEP di Nigeria dengan

melaporkan kondisi keterlibatan perempuan di ruang kepemimpinan dan memberikan pelatihan kepada pengusaha perempuan di Nigeria (Korieocha 2022).

Selain itu, NGO lain yang menjadi *second shadow* dari UN Women adalah, UNDP yang merupakan salah satu struktur bagian dari PBB. UNDP sendiri merupakan struktur PBB yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia di negara tujuan, kerja sama antara UN Women dan UNDP merupakan dua hal yang saling berkaitan. UNDP membantu UN Women dalam memantau kondisi sumber daya manusia yang ada di Nigeria dengan mendata pendidikan perempuan, partisipasi kepemimpinan dan politik perempuan, dan angkatan kerja perempuan. Semua itu menjadi bahan yang dibutuhkan UN Women untuk menyusun program terkait pemberdayaan perempuan. Bahkan keduanya juga melakukan kolaborasi dalam mengadakan pelatihan dan seminar pemberdayaan perempuan di Nigeria.

3.1.3 Monitoring oleh *The UN Women Nigeria Country Office (CO)*

Di dalam pendekatan manajerial proses pemantauan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk dengan mengirimkan komite dan tim ahli perwakilan UN Women di negara tujuan untuk menilai apakah dan bagaimana pemerintah negara tersebut memenuhi komitmen internasionalnya. Tim ahli tersebut akan melaporkan kemajuan negara tujuan dan laporan ini nantinya akan melengkapi laporan yang diberikan dari pemerintah negara tujuan (Joachim, Reinalda, Verbeek 2008). Dalam hal ini UN Women telah mengirimkan komite ahli dari tim mereka ke Nigeria untuk memantau negara tersebut. Proses pemantauan oleh UN Women terhadap pelaksanaan implementasi komitmen internasional Nigeria didukung dengan didirikannya kantor

perwakilan UN Women di Nigeria pada tahun 2012. *Country Office* (CO) ini didirikan dengan fokus terhadap intervensi normatif, koordinasi dan program CO bekerja dengan berbagai mitra untuk untuk mengubah kondisi kesetaraan gender di Nigeria. Pada tingkat operasional, CO secara khusus berfokus pada empat bidang intervensi prioritas: (1) kepemimpinan perempuan kepemimpinan dan partisipasi politik, pemberdayaan dan ketahanan ekonomi ekonomi perempuan, pemberdayaan dan ketahanan ekonomi perempuan (UN Women 2020). Dengan dibangunnya kantor resmi UN Women di Nigeria akan membuat kemudahan dalam urusan pemerintah Nigeria dan UN Women (UN Women n.d.). Tim ahli tersebut akan melaporkan kemajuan negara tujuan. Selain itu, komite ahli yang melakukan pemantauan bisa memberikan evaluasi tindakan apa saja yang perlu dilakukan oleh organisasi internasional dalam mengatasi masalah yang ada di negara tujuan, seperti UN Women yang mengirimkan tenaga ahli gender untuk melakukan pelatihan pemberdayaan pada tahun 2020 kepada perempuan Nigeria sebagai bentuk jawaban atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh komite ahli di sana yang melihat kalau perempuan Nigeria membutuhkan bantuan pengetahuan untuk mengembangkan kapasitas mereka sebab kurangnya partisipasi mereka di ruang public (UN Women 2020).

3.2 Kerja Sama UN Women dengan Pemerintah Nigeria, Masyarakat Sipil, NGO, ILO, UNHCR, UNDP, FAO dalam Mengatasi Ketidaksetaraan Gender di Bidang Ekonomi dan Politik di Nigeria

Dengan jumlah populasi terbanyak di kawasan Afrika dan menjadi urutan ketujuh negara dengan populasi terbanyak di dunia menjadikan Nigeria menyimpan permasalahan yang kompleks terutama dalam hal ketidaksetaraan gender. Semenjak kemerdekaan Nigeria di tahun 1960, Nigeria hingga saat ini belum memiliki presiden perempuan atau wakil presiden perempuan meskipun perempuan mendominasi setengah dari para pemilih. Keterwakilan perempuan di sektor politik tercatat rendah, perekonomian perempuan di beberapa negara Nigeria juga tidak rata dan mereka sering mengalami diskriminasi atas pekerjaan tertentu yang membuat kondisi perekonomian perempuan tidak lebih baik dibandingkan dengan laki-laki. UN Women melihat bahwa perempuan terus ditinggalkan dan di pinggirkan dalam ruang publik. Berangkat dari permasalahan tersebut UN Women kemudian bekerja sama dengan pemerintah mitra masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat seperti Badan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (SMEDAN), Organisasi Masyarakat Sipil Nigeria untuk bersama-sama membantu mengatasi ketidaksetaraan gender di Nigeria melalui program pemberdayaan perempuan. Selain itu, UN Women juga mengajak kerja sama struktur badan organisasi PBB lainnya untuk membantu jalannya program pemberdayaan perempuan di Nigeria, seperti UNDP, FAO, ILO, UNHCR. Kerja sama yang dilakukan oleh UN Women dengan banyak aktor tadi membuktikan kalau UN Women sangat terbuka kepada siapapun untuk melakukan kerja sama dalam mengatasi

ketidaksetaraan gender terhadap perempuan Nigeria. Kerja sama UN Women dengan beberapa aktor dan mitra terkait merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan UN Women sebagai organisasi internasional.

3.2.1 Kerja sama UN Women, Pemerintah Nigeria, Masyarakat Sipil Nigeria, NGO.

Untuk menjalankan program pemberdayaannya UN Women mengajak beberapa aktor-aktor di Nigeria, mulai dari pemerintah terkait seperti Kementerian Urusan Wanita Federal dan Pembangunan Sosial. Pada tahun 2017 Kementerian Urusan Wanita Nigeria bekerjasama dengan UN Women meluncurkan kampanye nasional “HeForShe”. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk mengajak dan menyebarkan kesadaran di kalangan para laki-laki mengenai pentingnya peran dan keterlibatan perempuan di ruang publik dan sekaligus menginspirasi untuk menghapuskan segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Kampanye ini telah berhasil menarik dukungan dan telah ditandatangani oleh sejumlah petinggi di Nigeria, seperti Wakil Presiden Republik Nigeria, menteri kabinet federal, beberapa gubernur negara bagian, kepala suku, hingga tokoh-tokoh agama. Pelibatan tokoh-tokoh masyarakat sipil seperti tokoh agama menjadi salah satu upaya UN Women untuk mereduksi secara perlahan budaya masyarakat patriarki yang ada di Nigeria. UN Women mempercayai Kementerian Urusan Wanita Federal dan Negara Bagian Nigeria dalam mengelola pembangunan sosial dan memfasilitasi akses perempuan Nigeria untuk kehidupan yang lebih baik melalui ekonomi makro nasional. UN Women juga

bekerjasama dengan Kementerian Federal Pertanian untuk memberikan merealisasikan program pertanian yang dapat menggerakkan ekonomi perempuan menjadi lebih baik lagi (The Federal Ministry of Women Affairs and Social Development 2019). Selain tokoh masyarakat UN Women Nigeria mengandeng Organisasi Masyarakat Sipil Nigeria untuk melakukan kerja sama. Adanya Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Nigeria ditujukan untuk menuntut pengesahan RUU kesetaraan keterwakilan perempuan dalam politik melalui Kelompok Kerja Mitra Partisipasi Politik Perempuan (UN Women 2020).

Selanjutnya pada bidang pemberdayaan politik perempuan Nigeria, UN Women bekerjasama dengan pemerintah yang terkait seperti, Komisi Pemilihan Nasional Independen (INEC), Institut Nasional untuk Kajian Demokrasi dan Legislatif, dan Komite Peninjau Konstitusi Senat (SRC) untuk menganalisis gender di Nigeria, menyoroti peraturan dan ketentuan yang sifatnya diskriminatif terhadap perempuan seperti pada konstitusi 1999, dan memperkuat undang-undang yang relevan pada kesetaraan gender. UN Women juga bekerjasama dengan media dan partai politik untuk membuka stereotip berbahaya terkait kepartaian. Lebih lanjut, UN Women mengandeng mediator perempuan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dalam politik dengan tujuan untuk mengubah pandangan publik mengenai kepemimpinan perempuan dan membawa pandangan positif mengenai pemimpin perempuan. Data dan informasi sangat diperlukan dalam membantu program pemberdayaan UN Women, maka dari itu UN Women juga menjalin mitra bersama *National Bureau Statistic of Nigeria* (NBCSN) untuk memperoleh jumlah data-data

ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi dan politik juga informasi mengenai kondisi perempuan setiap tahunnya untuk dianalisis dan menjadi patokan dalam mengambil keputusan.

Sementara itu di bidang ekonomi, UN Women juga melakukan kerja sama dengan beberapa NGO, seperti SMEDA yang melakukan kerjasama pengembangan usaha kecil para perempuan Nigeria. Selanjutnya ada WISCAR organisasi non pemerintah yang memiliki visi untuk membantu memajukan wanita generasi selanjutnya dalam hal kepemimpinan di ranah politik. CEO dari WISCAR mengatakan generasi perempuan muda berada pada titik balik yang kritis dan industri periklanan merupakan memiliki peran yang penting untuk mendorong narasi positif tentang keberagaman dan inklusi dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. WISCAR ingin mendobrak stereotip dan secara aktif membentuk stereotip yang positif mengenai perempuan dan kepemimpinan (UN Women 2021).

3.2.2 Kerja Sama UN Women, FAO, UNDP, UNHCR, dan ILO

UN Women juga menjalin kemitraan bersama dengan beberapa badan-badan PBB lain, seperti *Food Agriculture Organization (FAO)*, *the Industrial Development Organization (UNIDO)*, *the UN Development Program (UNDP)*, dan juga *International Labour Organization (ILO)* untuk mendukung pemerintah Nigeria dan juga koperasi petani wanita serta asosiasi agribisnis (UN Women n.d).

Penurunan partisipasi perempuan di bidang politik Nigeria semakin mengkhawatirkan yang menyebabkan UNDP dan UN Women bekerjasama untuk memulihkan representasi politik perempuan agar tidak hilang. UNDP bekerjasama

dengan UN Women guna mendukung reformasi hukum agar mendorong partisipasi politik perempuan nigeria (Impactpool n.d.). Sebelumnya UNDP sudah memberikan dukungan kepada pemerintah Nigeria dalam mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan, karena UNDP merupakan bagian struktur PBB yang memiliki fokus pada pembangunan global dengan tanggung jawab untuk memberikan perubahan pada negara-negara yang membutuhkan untuk membangun kehidupan yang lebih baik dengan mengadvokasi perubahan melalui pengetahuan dan pengalaman agar sumber daya manusia di sebuah negara menjadi lebih baik lagi. Di lain sisi, berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), visi UN Women adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di semua bidang dan menghapuskan semua diskriminasi, serta mewujudkan pemberdayaan perempuan untuk meraih hak-haknya di berbagai bidang (Impactpool 2017).

Baik UNDP dan UN Women kedua organisasi ini sama-sama memiliki tujuan untuk membawa perubahan pada masyarakat negara tujuan untuk membangun kehidupan lebih baik tanpa diskriminasi berdasarkan gender di seluruh bidang dan mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia. Kesamaan tujuan itu yang membuat UNDP dan UN Women melakukan kerjasama. Keduanya memiliki kepentingan yang sama dan hal tersebut sesuai dengan pendekatan manajerial yang menekankan kalau kesamaan tujuan dan adanya kepentingan bersama antar aktor akan memberikan keterbukaan untuk melakukan kerja sama untuk memperoleh sebuah keseimbangan dan akan memberikan efek kepatuhan pada perjanjian internasional.

UN Women juga bermitra dengan *International Labour Organization* (ILO) untuk mengembangkan panduan kebijakan yang akan membantu pemerintah Nigeria dalam memperkuat dan mempromosikan kebijakan sektoral yang akan meningkatkan akses perempuan kepada kesempatan lapangan pekerjaan yang layak (UN Women 2021).

Organisasi Pangan dan Pertanian juga terlibat kerja sama dengan UN Women, keduanya bersama melakukan program pemberdayaan perempuan ekonomi wanita dan menjangkau perempuan pedesaan yang ada di Nigeria. FAO memberikan kontribusinya dengan mendukung pemerintah Nigeria untuk merancang pemberdayaan di berbagai sub-sektor pertanian, kehutanan, dan menerapkan program agrikultur yang berkelanjutan (Africa UN Women 2020). Pada tahun 2018 UN Women mengadakan *campaign* dengan tema “Akhiri Kekerasan Berbasis Gender di Dunia Kerja” dengan *hashtag* #HearMeToo. Tema tersebut menyuarakan mengenai pentingnya gerakan #MeToo. Di dalam kampanye tersebut FAO juga ikut bergabung untuk mendukung program pemberdayaan perempuan. Selain itu UN Women juga melakukan kerja sama dengan badan pengungsi PBB, UNHCR, melakukan mitra bersama dengan LSM, Apou au Development untuk mendukung para perempuan pengungsi akibat konflik Boko Haram dalam menjalankan dan membangun bisnis sendiri (UN Women 2017).

3.3 Bantuan Keuangan dan Teknis Oleh UN Women kepada Nigeria Untuk Mengatasi Ketidaksetaraan Gender di Bidang Ekonomi dan Politik Perempuan Nigeria

Pendekatan manajerial mengatakan kalau bantuan keuangan dan teknis yang diberikan oleh organisasi internasional dapat mengembangkan kapasitas mereka dan mendukung implementasi perjanjian internasional di sebuah negara. Pemberian bantuan ini merupakan bentuk usaha kooperatif dari organisasi internasional dengan melibatkan beberapa mitra terkait.

3.3.1 Bantuan Keuangan dari UN Women kepada Nigeria

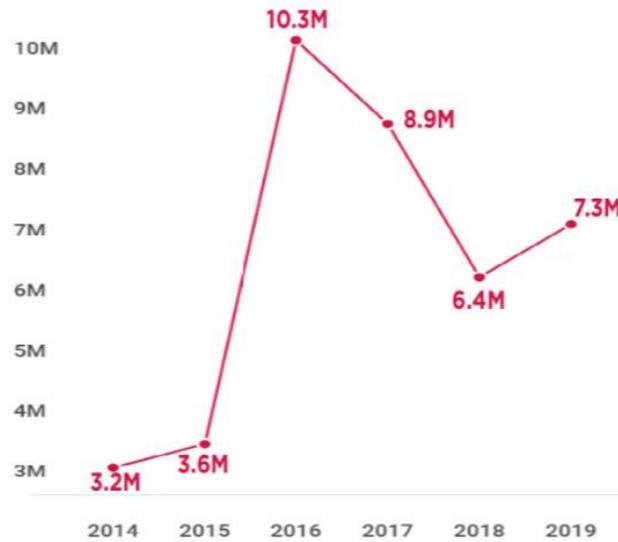
Pengurangan Ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi dan politik terhadap perempuan di Nigeria melalui pemberdayaan di kedua bidang tersebut telah dilakukan oleh UN Women. Pemberdayaan yang dilakukan oleh UN Women direalisasikan dalam sejumlah program yang ditargetkan kepada perempuan Nigeria. Perempuan Nigeria dibekali keterampilan dan bantuan oleh UN Women beserta mitranya. UN Women juga memberikan bantuan keuangan melalui kerja sama dengan Pemerintah Nigeria untuk diberikan kepada perempuan yang rentan. Bantuan keuangan tersebut mendukung pemberdayaan perempuan sebagai tanggapan akan pembebasan dari ketidaksetaraan gender agar nantinya bisa memaksimalkan kapasitas perempuan Nigeria.

UN Women memiliki program untuk membantu perempuan di seluruh dunia untuk meluaskan kapasitas mereka terlibat dalam ruang publik dan terbebas dari rasa

takut serta tindakan diskriminatif melalui *Fund for Gender Equality* (FGE). FGE ini merupakan program hibah global yang didedikasikan oleh UN Women untuk mendukung sepenuhnya pemberdayaan ekonomi dan politik perempuan. FGE akan memberikan bantuan dana pada perempuan yang memiliki kerentanan dan siap menjangkau mereka. Di Nigeria FGE melakukan kerja sama dengan *Alliance for Africa* (AfA) dan memberikan bantuan dana hibah sebesar US \$175.000 (Fund for Gender Equality 2019). UN Women bekerjasama dengan beberapa mitra seperti Bank Pembangunan Afrika, Republik Korea, dan UNDP dalam hal pendanaan (UN Women Africa n.d). Pada tahun 2017 bantuan sebesar US\$ 8.9M telah dialokasikan pada anggaran kelembagaan UN Women Nigeria untuk digunakan dalam mewujudkan program-program UN Women Nigeria dan pada tahun 2020 UN Women kembali memobilisasi bantuan keuangan sebesar US\$ 10.737.115 (IEAS, n.d.). Gambar di bawah ini menunjukkan budget tahunan yang dikeluarkan oleh UN Women untuk mendukung jalannya program UN Women di Nigeria.

Gambar 3 : Total Budget tahunan UN Women untuk Nigeria

CO Total Annual Budget US\$ (2014-2019)



Sumber : *Independent Evaluation and Audit Services (IEAS)*

Bantuan keuangan yang diberikan kepada Nigeria untuk mengatasi permasalahan ini berasal dari berbagai mitra UN Women. Secara keseluruhan Uni Eropa memiliki kontribusi paling besar mencapai 70% dari total dana yang dimobilisasi senilai US\$ 18 juta. Mitra donor terbesar berikutnya berasal dari pemerintahan Jepang, Norwegia, dan Kanada. Tiga teratas pendonor dana terhadap program UN Women di Nigeria ini memegang kendali dan kontribusi yang besar pada Badan Pengelola Program CO Nigeria (UN Women 2020). Selain bantuan dari beberapa negara donor, UN Women juga bekerjasama dengan sektor yayasan swasta seperti MasterCard. MasterCard ini merupakan perusahaan swasta pelayanan keuangan yang ikut mendanai program pemberdayaan perempuan di Nigeria mendukung program yang dirancang oleh UN Women (Mastercard Foundation Gender and Youth Livelihoods 2018). Bantuan keuangan yang diperoleh dari berbagai mitra tersebut lalu dialokasikan kepada

program-program pemberdayaan perempuan Nigeria. Ketika tahun 2019, diadakan Konferensi Nasional Pasca Pemilu yang diselenggarakan oleh UN Women, ECES, IFES dan NDI. Para mitra secara kolektif mengumpulkan dana sebesar US\$ 30.000 untuk konferensi tersebut pada bulan Juni 2019 (UN Women 2020).

3.3.2 Bantuan Teknis dari UN Women kepada Nigeria

Jumlah penduduk perempuan di Nigeria mendominasi hampir setengah jumlah penduduk total dan dengan jumlah perempuan yang banyak itu jika dibarengi dengan pemberdayaan sumber daya perempuannya melalui bantuan-bantuan teknis berupa pengetahuan, informasi, dukungan keuangan, dan perluasan akses dalam pekerjaan dan politik akan berpengaruh pada pembangunan nasional. Bersama dengan Kementerian Urusan Perempuan Nigeria, UN Women memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan untuk mendorong kapasitas perempuan menjadi lebih baik lagi. Bantuan teknis yang diberikan dapat berupa pelatihan, *workshop*, penyediaan informasi dan fasilitas.

Pada tahun 2020, UN Women bersama dengan Forum Politik Perempuan mengadakan pelatihan kepemimpinan politik terhadap perempuan muda Nigeria dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai politik, mereka akan diberikan pelatihan bagaimana membuat sebuah kebijakan, berkampanye, melakukan advokasi, dan pandangan-pandangan seputar perpolitikan. Pelatihan itu diharapkan akan membuat perempuan Nigeria khususnya generasi muda untuk ikut aktif berpartisipasi di dalam dunia politik dan menyuarakan aspirasi mereka untuk pembangunan masa depan. Selain pelatihan perempuan muda, UN Women juga memfasilitasi anggota parlemen perempuan pelatihan lokakarya selama dua hari.

Tujuan dari pelatihan tersebut agar dapat meningkatkan pengetahuan anggota parlemen dalam menyusun konstitusi yang bersifat responsif gender (UN Women 2020). Dalam memberikan pelatihan tersebut, UN Women menghadirkan dan melibatkan banyak ahli gender dan juga konstitusi agar menjadi lebih berbobot.

Selain di bidang politik, UN Women berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian melakukan penyuluhan pertanian dengan memberikan informasi terkait benih yang berkualitas, lalu penyuluhan mengenai digitalisasi dan teknologi kepada pebisnis perempuan untuk paham mengenai ekonomi digital yang sedang berkembang sekarang. UN Women mengadakan *workshop* seputar *branding* dan pembuatan sabun juga kosmetik kepada perempuan Nigeria dengan harapan akan menambah keterampilan mereka sehingga bisa memajukan perekonomian perempuan. UN Women juga memberikan fasilitas bantuan berupa tiga mesin penggiling padi untuk memfasilitasi petani perempuan untuk bekerja (UN Women Africa n.d).

3.4 Implementasi Kebijakan UN Women Dalam Pengembangan Kapasitas Perempuan Nigeria Melalui Program Pemberdayaan di Bidang Ekonomi dan Politik

Dalam menjawab permasalahan terkait dengan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan di Nigeria, UN Women sebagai organisasi internasional melakukan upaya dalam mengembangkan kapasitas mereka sebagai perempuan untuk keluar dari ketidaksetaraan dalam hak-hak yang mereka rasakan dan hadapi. Upaya ini merupakan

cara UN Women membantu Nigeria untuk tetap memenuhi komitmen internasionalnya.

3.3.1 Program Pemberdayaan UN Women di Nigeria pada Bidang Ekonomi

Perempuan di Nigeria sebagian besarnya bekerja di sektor agrikultur dan Nigeria merupakan negara yang sensitif pada perubahan cuaca, hal itu yang kemudian menjadi tantangan bagi perempuan Nigeria untuk menyesuaikan kondisi. Perubahan cuaca yang sering terjadi di Nigeria menghasilkan kerja sama antara Kementerian Federal Urusan Wanita dengan UN Women melakukan *Women's Economic Empowerment through Climate Resilient Agriculture* (WEE CRA).

Pada tahun 2016 UN Women melakukan mitra dengan MasterCard, National Identity Management Commission (NIMC) dan Zamani Foundation meluncurkan pendaftaran *Biometric Electronic Identity* (eID) untuk 500.000 wanita di Nigeria di bawah proyek UN Women MasterCard pada tanggal 9 November 2016. Sebanyak 5.000 perempuan akan didaftarkan selama fase 10 hari di mulai dari tanggal 9 November 2016. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk membantu perempuan yang rentan dan belum mengetahui mengenai akses finansial untuk menikmati hak-hak mereka. Di sini UN Women mendukung pemerintah Nigeria untuk memobilisasi 500.000 perempuan di empat negara bagian, yaitu Lagos, Kaduna, Adamawa, dan Edo untuk mengikuti program ini. Perempuan Nigeria diharapkan dapat menggunakan kartu ini untuk melakukan pembayaran elektronik dan mendapatkan kredit untuk memenuhi finansial mereka sebagai langkah dasar menuju inklusi keuangan (UN Women 2016).

Gambar 4. Demonstrasi Proses Pendaftaran Selama Peluncuran



Sumber : *UN Women 2016*

Pada tahun 2017 bersama dengan *International Fund for Agricultural Organization, World Food Programme (WFP)*, dan *Food Agriculture Organization (FAO)*, UN Women melakukan peningkatan pada peluang ekonomi perempuan sebanyak 18.000 di beberapa Negara termasuk Nigeria. Program bersama yang mereka lakukan seperti, memberikan strategi dukungan bisnis kepada perempuan, penyuluhan pertanian dan pemberian benih berkualitas tinggi kepada petani perempuan, serta menciptakan koperasi pertanian yang dapat menopang petani perempuan (UN Women 2017).

Di tahun 2018 UN Women lebih berfokus pada pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan nasional terhadap komitmen internasional. Terkhusus di Nigeria,

pada sektor ekonomi UN Women fokus pada pemberdayaan juga ketahanan ekonomi para perempuan. Di tahun ini UN Women bersama dengan mitra-mitranya telah melakukan proses pemantauan dan identifikasi program bersama dan peluang program tersebut untuk dapat dikembangkan, ada beberapa dari program tersebut sudah mulai dilakukan seperti Program Bersama Pertanian Tahan Iklim, Pemulihan Pertanian di Negara Bagian, Penguatan Ketahanan Masyarakat dan semua itu merupakan hasil rancangan program bersama dengan UNDP, FAO, WFP, dan ILO (UN Women 2019).

Menjadi sebuah tantangan untuk UN Women di tahun 2020 pandemi COVID-19 menyerang Nigeria. Kondisi itu memperburuk ketidaksetaraan gender yang telah ada sebelumnya. Di dalam sektor ekonomi, UN Women Nigeria memberikan akses kepada petani perempuan ke input pertanian yang lebih baik, para perempuan yang terkena dampak COVID-19 yang berada di pedesaan didukung dengan pemberian keterampilan yang akan mendorong mereka menghasilkan pendapatan, sehingga mereka bisa tetap membiayai kehidupannya. UN Women juga memberikan bantuan tunai dan paliatif kepada kelompok perempuan yang memiliki bisnis dan terkena dampak paling buruk dari COVID-19. Di tahun ini juga UN Women memberikan perubahan yang cukup bagus sehingga terdapat perubahan tren dalam melawan ketidaksetaraan gender yang ada di Nigeria.

Dikutip dari situs resmi UN Women (UN Women 2020), perwakilan UN Women dan ECOWAS, Ms. Comfort Lamptey, mengatakan persentase perempuan yang bekerja di sektor UKM sebanyak 22% dan 47,8% lainnya adalah pemilik usaha mikro yang berfokus pada sektor ekonomi tertentu seperti manufaktur, layanan,

akomodasi, pertanian, grosir, dan makanan. (United Nations Nigeria 2020). Besarnya jumlah persentase perempuan yang bekerja di bidang UKM dan memiliki usaha mikro di berbagai sektor membuat kekhawatiran akan terjadi penurunan pendapatan para perempuan di Nigeria ketika pada tahun 2020 pandemi COVID-19 melanda negara tersebut. UN Women kemudian bekerjasama dengan pemerintah Nigeria untuk membantu meringankan beban perempuan yang rentan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan memberikan bantuan keuangan sebesar N38 juta. Dana tersebut diberikan kepada Kementerian Federal Urusan Wanita. Dana bantuan tersebut akan didistribusikan dalam bentuk makanan, sabun, pembersih, dan masker yang di akan diperoleh dari usaha para perempuan, sehingga usaha perempuan Nigeria tetap berjalan meskipun COVID-19 melanda Nigeria (United Nations Nigeria 2020). Pandemi yang terjadi di tahun 2020 sangat mempengaruhi semua lapisan masyarakat, namun perempuan menjadi yang paling rentan, karena di Nigeria perempuan yang paling dibebani oleh tanggung jawab menafkahi dan membantu keuangan rumah tangga (United Nations Nigeria 2020).

Pada bab 2 telah dipaparkan beberapa tantangan perempuan di bidang ekonomi seperti, perempuan yang bergaji rendah dengan pekerjaan yang tidak aman mencapai 84,8% lebih banyak dari laki-laki yang hanya 71,7%. Di tahun 2020 angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan juga tidak sama, perempuan hanya memiliki 47,8% dibandingkan dengan laki-laki yang menyentuh angka 57,8%. Ditambah adanya kesenjangan gender terhadap akses informasi dan teknologi yang membuat perempuan memiliki keterbatasan dalam menguasai digitalisasi bisnis. Menurut *annual report*

yang dikeluarkan oleh UN Women Nigeria pada tahun 2020 hanya 45% perempuan Nigeria yang mengetahui mengenai internet seluler, padahal di tahun 2020 terjadi peralihan bisnis *offline* menjadi bisnis digital karena pengaruh COVID-19. Untuk itu UN Women Nigeria pada tahun 2020 melakukan intervensi untuk memberikan pemberdayaan inklusi petani perempuan melalui pelatihan yang langsung dilatih oleh Kementerian Pertanian Negara dan Urusan Wanita untuk memperoleh keterampilan yang lebih baru dan perluasan usaha. Petani perempuan diberikan pelatihan pasca panen dengan teknologi *parboiling*. Setelah pelatihan tersebut, UN Women memberikan tiga mesin penggilingan padi seberat 300 kilogram dengan generator 22 kVA yang difasilitasi untuk petani perempuan. Selain itu perempuan Nigeria juga diberikan keterampilan baru dalam membuat branding usaha mereka, lalu diberikan keterampilan dalam pembuatan kosmetik, sabun, dan pengolahan *shea butter* untuk dipasarkan secara lokal hingga internasional.

UN Women juga menggandeng perusahaan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas perempuan di sektor wilayah swasta. Para perempuan diberikan pelatihan dan pengetahuan mengenai ketidaksetaraan gender yang dapat menciptakan implikasi berbahaya pada keberlanjutan bisnis mereka dan mereka juga diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan individu.

3.3.2 Program Pemberdayaan UN Women di Nigeria pada Bidang Politik

Sebagai organisasi internasional yang memiliki fokus pada pengentasan tindakan diskriminatif dan ketidaksetaraan gender di semua sektor termasuk politik,

UN Women juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di sektor politik melalui program-program yang telah dirancang untuk dapat memberdayakan kapasitas perempuan Nigeria di bidang perpolitikan. Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, tantangan perempuan Nigeria di bidang politik adalah terbatasnya akses mereka untuk terlibat di dalam ruang politik, karena adanya pembatasan kuota perempuan di parlemen, juga adanya undang-undang yang kurang ramah terhadap perempuan sehingga bisa menyebabkan pembatasan hingga diskriminatif terhadap hak-hak perempuan. Ditambah perempuan Nigeria banyak yang belum memiliki pengetahuan seputar dunia politik, sehingga menyulitkan mereka untuk berpartisipasi lebih dalam perpolitikan Nigeria.

Untuk mengatasi itu semua UN Women telah melakukan beberapa upaya seperti melakukan kerja sama dengan Komite Peninjau Konstitusi Senat dalam meninjau konstitusi juga melakukan perubahan pada rancangan undang-undang yang sifatnya dapat menghambat menuju kesetaraan dan kemajuan gender di Nigeria, seperti peraturan pada konstitusi 1999 pasal 14(3) yang berbunyi “Komposisi Pemerintahan Federasi atau Lembaga-lembaganya dan pelaksanaan urusan-urusannya harus dilakukan sedemikian rupa untuk mencerminkan karakter federal Nigeria dan kebutuhan untuk mempromosikan persatuan nasional, dan juga untuk memerintahkan kesetiaan nasional, dengan demikian memastikan bahwa tidak akan ada dominasi orang-orang dari beberapa negara bagian atau dari beberapa kelompok etnis atau kelompok-kelompok bagian lainnya dalam pemerintah atau di salah satu lembaganya”. Konstitusi tersebut dianggap tidak memasukkan pertimbangan gender dalam

komposisi pemerintah dan lembaga-lembaganya dan banyak yang menganggap konstitusi ini akan menghalangi tindakan afirmatif yang berpihak pada perempuan dan dapat memberikan ruang untuk memarjinalisasi perempuan (Hassan 2013).

UN Women berkonsultasi dengan pemangku kepentingan untuk melakukan reformasi hukum yang bersifat responsif gender. Bukan hanya itu saja, usaha UN Women dalam mendukung perempuan Nigeria untuk secara aktif berpartisipasi pada dunia politik diperlihatkan dengan penyelenggaraan akademi pelatihan kepemimpinan politik oleh UN Women yang bekerjasama dengan Forum Perempuan Politik kepada perempuan muda Nigeria. Hasil dari pelatihan di akademi tersebut adalah para perempuan muda tadi akan bergabung dengan partai politik yang mereka pilih sendiri. UN Women tidak hanya mengembangkan kapasitas perempuan muda saja, namun juga ikut melibatkan sejumlah anggota parlemen perempuan tingkat federal dan negara bagian untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh UN Women bekerjasama dengan Lembaga Legislatif Nasional dan Studi Demokrasi Nigeria (NILDS). Pelatihan tersebut diselenggarakan dalam bentuk lokakarya fisik dan virtual yang diadakan selama dua hari dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota parlemen dalam mengadvokasi dan menyusun konstitusi yang bersifat responsif gender (UN Women 2020).

Gambar 5. Peserta Pelatihan Legislator Perempuan Tentang Legislasi Responsif Gender



Sumber : *UN Women Nigeria Annual Report 2020*

Untuk permasalahan mengenai kuota perempuan di dalam pemilihan, UN Women beserta *the Independent National Electoral Commission* (INEC) dan *the Federal Ministry of Women Affairs* Nigeria merekomendasikan langkah-langkah dalam menerapkan sistem kuota untuk pemilu yang akan datang yaitu di tahun 2023, yaitu (UN Women 2020) :

1. Mempublikasikan daftar kandidat perempuan dua tahun sebelum dilakukannya pemilihan umum
2. INEC membuat syarat wajib kepada partai politik ketika ingin mendaftar harus memenuhi kuota gender (ada perempuan di dalamnya).
3. Memberlakukan sanksi pada partai politik yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

4. Evaluasi mengenai pelaksanaan kuota gender setiap periode nya pemilu dan melaporkannya kepada presiden atau majelis nasional.



BAB IV

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Ketidaksetaraan gender telah menjadi isu secara global. Ketidaksetaraan gender bisa menyerang laki-laki dan perempuan, namun secara realita di lapangan, perempuan lebih rentan menjadi korban dari fenomena ketidaksetaraan gender. Di Nigeria ketidaksetaraan gender telah menjadi persoalan nasional. Perempuan Nigeria mendapatkan perlakuan tidak setara dan diskriminatif di bidang politik dan ekonomi paling banyak. Jumlah partisipasi perempuan di bidang politik dan angkatan kerja perempuan yang sedikit dibandingkan dengan laki-laki merupakan contoh adanya ketidaksetaraan gender dalam bentuk diskriminasi. Pengkotak-kotakan posisi antara perempuan dan laki-laki mempersempit ruang perempuan. Secara keseluruhan ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan gender khususnya di bidang ekonomi dan politik terjadi, pertama faktor pendidikan, kedua, kondisi negara Nigeria yang memiliki budaya masyarakat patriarki juga mendorong rendahnya perekonomian perempuan di Nigeria, ketiga, adanya ketimpangan pengetahuan dan informasi antara laki-laki dan perempuan di Nigeria berdampak negatif pada akses peluang ekonomi.

Untuk mengatasi hal tersebut, UN Women bekerjasama dengan berbagai pihak untuk bersama dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi dan politik yang dirasakan perempuan Nigeria melalui program pemberdayaan politik dan ekonomi. Berdasarkan teori implementasi organisasi internasional, UN Women menggunakan satu pendekatan dalam menyebarkan nilai dan visinya untuk mengatasi

ketidaksetaraan gender bidang ekonomi dan politik perempuan Nigeria yaitu *Managerial Approach*.

Pendekatan manajerial atau manajemen ini melihat bagaimana implementasi kebijakan organisasi internasional seperti UN Women dilakukan melalui, *monitoring* berdasarkan laporan dari Nigeria, mitra yang bekerja sama dengan UN Women, hingga melalui laporan dari komite ahli yang mewakili UN Women, laporan tersebut akan digunakan oleh UN Women untuk melengkapi data-data yang diperoleh oleh pemerintah Nigeria guna mengatasi ketidaksetaraan gender bidang ekonomi dan politik terhadap perempuan di Nigeria, lalu berdasarkan pendekatan manajerial UN Women juga bekerja sama dengan berbagai aktor seperti Pemerintah Nigeria, masyarakat sipil, NGO, organisasi struktur PBB lain seperti UNHCR, UNDP, ILO, FAO untuk mendukung program yang dirancang oleh UN Women. Berdasarkan pendekatan manajerial, UN Women Nigeria telah melakukan perannya dengan melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi dan politik. Pemberdayaan tersebut meliputi pemberian bantuan keuangan dan teknis dengan melakukan pelatihan perekonomian perempuan yang berkelanjutan hingga pelatihan politik perempuan untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan mereka terkait perpolitikan. Dalam mengatasi persoalan ketidaksetaraan gender di Nigeria ini, UN Women sangat transparan dan terbuka untuk bekerja sama dengan banyak aktor dan mitra lainnya. UN Women juga mempublikasikan laporan tahunan nya, apa saja kegiatan yang telah mereka lakukan, hingga laporan keuangan semua tercantum di situs resmi mereka untuk dapat di akses oleh publik dan bisa dijadikan informasi juga pengetahuan bersama.

Adanya implementasi kebijakan oleh UN Women dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi dan politik terhadap perempuan di Nigeria ini telah memberikan dampak yang baik bagi Nigeria sebab banyak program pemberdayaan di masyarakat dengan memberikan bantuan peralatan, akses, pengetahuan, informasi, juga pelatihan dari tahun 2016-2020 yang sangat membantu perempuan Nigeria untuk perlahan keluar dari cengkaman ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi dan politik.

2.2 Rekomendasi

Penulis menyadari masih ada beberapa hal yang belum dibahas secara sempurna di dalam penelitian ini dan dapat dibahas lebih lanjut pada penelitian selanjutnya. Pertama, objek dari penelitian ini mengenai ketidaksetaraan gender pada bidang ekonomi dan politik dan kedua bidang tersebut belum mencakup keseluruhan permasalahan ketidaksetaraan gender yang ada di Nigeria. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian selanjutnya dapat mendalami dan mengangkat permasalahan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan di bidang lainnya agar dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai ketidaksetaraan gender terhadap perempuan di Nigeria. Kedua, penelitian ini menggunakan sudut pandang UN Women dalam melihat kondisi ketidaksetaraan gender terhadap perempuan yang ada di Nigeria, namun selain UN Women ada beberapa aktor lainnya yang juga berperan dalam membantu di dalam permasalahan ini seperti UNICEF dan hal itu bisa dijadikan sebagai salah satu pembahasan penelitian selanjutnya. Ketiga, penelitian ini meneliti peran UN Women dalam mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender di Nigeria dan penulis melihat

masih sedikit yang membahas keterkaitan antara UN Women dan permasalahan perempuan di Nigeria, padahal banyak hal menarik untuk dibahas seperti konflik Boko Haram dan posisi UN Women dalam mengatasi hal tersebut, karena belum ada penelitian yang mengangkat peran organisasi internasional yang berfokus pada kesejahteraan perempuan di Nigeria dalam konteks konflik Boko Haram dan hal itu menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut.



DAFTAR PUSTAKA

- Ch, Mufidah. 2010. *Isu-Isu Gender Kontemporer*. 1st ed. Malang, Indonesia: UIN Maliki Press.
- Civil Recource Development and Documentation Centre. 2016. *Identyfing Nigeria's Commitment to the Convention on the Elimination of alla forms of Discrimination againts Woman (CEDAW)*. 1st ed. Enugu, Nigeria: Fourth Dimension Publishing. <https://cirddoc.org/wp-content/uploads/2016/10/CEDAW-Identifying-Nigerias-Commitment-PLANNED.pdf>.
- Ekhato, Eghosa Osa. 2015. "Women and the Law in Nigeria: A Reappraisal ." *Journal of International Women's Studies* 1-13.
- Fund for Gender Equality. 2019. "WEST AND CENTRAL AFRICA : 2009-2019 PORTFOLIO OVERVIEW Ten Years of Reaching the Furthest Behind." https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Trust%20Funds/FundGenderEquality/FGE%20Factsheet_Western%20and%20Central%20Africa_2019.pdf.
- Gbadebo, Adebosin W., Toriola A. Keshiro, Oyewole A. Sule, Ayanwole A. Adeyemi, and Balogun K. Yemi. 2018. "Gender Equality and Sustainable Development in Nigeria." *Covenant Journal of Entrepreneurship (CJoE)* 2, no. 2 (December): 42-53.
- Hassan, Aminu. 2013. *Premium Times*. 28 Juli. Accessed Maret 2023, 12. <https://www.premiumtimesng.com/opinion/141797-how-nigeria-legalizes-discrimination-against-women-by-aminu-hassan-gamawa.html?tztc=1>.
- (IEAS). n.d. In *Country Portfolio Evaluation Nigeria*. N.p.: UN Women. Accessed December 18, 2022. <https://gate.unwomen.org/EvaluationDocument/Download?evaluationDocumentID=9487>.
- Impactpool. 2017. "National Constitution and Gender Expert for Nigerian Senate." Impactpool. <https://www.impactpool.org/jobs/728482>.

- Inter-Parliamentary Union. 2022. "Women's political empowerment in Nigeria." Inter-Parliamentary Union. <https://www.ipu.org/news/case-studies/2022-08/womens-political-empowerment-in-nigeria>.
- Joachim, Jutta, Bob Reinalda, and Bertjan Verbeek. 2007. *International Organizations and Implementation*. first ed. New York, USA: Routledge.
- Korieocha, Ifeoma O. 2022. "NGO, UN partner to drive Women Empowerment Principles at workplace." Business Day. <https://businessday.ng/news/article/ngo-un-partner-to-drive-women-empowerment-principles-at-workplace/>.
- Kemi, Adams O., and Olajumoke G. Jenyo. 2016. "Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls in Nigeria: The Way Forward to National Security." *Open Journal of Social Sciences* 4 (July): 230-240.
- Mastercard Foundation Gender and Youth Livelihoods. 2018. *Gender and Youth Livelihoods Programming in Africa*. N.p.: MasterCard Foundation. <https://mastercardfdn.org/wp-content/uploads/2018/06/MCF13027-ODI-Gender-Paper-Digital-Download-vFF-2-accessible2.pdf>.
- Offiong, Ekwutosi E., Eyo I. Eyo, and Asibong E. Offiong. 2021. "Patriarchy, Culture and the Social Development of Women in Nigeria." *Journal of Art, Humanity, and Social Studies* 1 (4): 1-8. <https://ojs.unm.ac.id/PJAHSS/article/download/26708/13541>.
- Ramadhan, Iqbal, and Innesia Ma'sumah. 2018. "Mengkaji Peran UN Women Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme." *Jurnal Asia Pacific Studies* 2, no. 2 (December): 144-160.
- Suri, Galuh A., Hamka, and Ali Noerzaman. 2020. "Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017." *Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 1, no. 1 (April): 1-11.
- Syafira, Dhea. 2020. "Girls Not Brides's Interest in Ending Child Marriage in Nigeria 2014-2019." *JOM FISIP* 7 (Desember): 1-16.

- The Conversation. 2023. *The Convrsation*. 19 Februari. Accessed Maret 2023, 12.
<https://theconversation.com/gender-equality-in-nigeria-three-reasons-why-women-arent-represented-in-politics-199321>.
- United Cities and Local Governments. n.d. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Perlu Diketahui*. N.p.: UCLG. Accessed Mei 12, 2022.
- United Nations Nigeria. 2020. “UN Women Supports Ministry of Women Affairs with N38 million for COVID-19 Palliatives targeted to Vulnerable Women.” United Nations Nigeria. <HTTP://nigeria.un.org/en/44881-un-women-supports-ministry-women-affairs-n38-million-covid-19-palliatives-targeted-vulnerable>.
- UN Women Afrika. n.d. “Where we are : West and Central Africa : Nigeria.” UN Women Africa. Accessed April 04, 2022
- UN Women . 2016 . *UN Women* . Accessed Maret 2023, 14 .
<https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2016/12/un-women-and-mastercard-launch-the-identity-registration-project-for-women-in-nigeria>.
- UN Women. 2010. “UN Women Staff Welcomes Michelle Bachelet.”
<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/9/un-women-staff-welcomes-michelle-bachelet>.
- UN Women. 2017. *Annual Report 2016-2017*. N.p.: UN Women.
<https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2017/UN-Women-Annual-Report-2016-2017-en.pdf>.
- UN Women. 2017. “Fleeing Boko Haram, women seek healing and economic resilience in Niger camps.” UN Women.
<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/10/feature-niger-fleeing-boko-haram>.
- UN Women. 2019. *Terms of reference National Evaluation Consultant UN Women Nigeria Country Portfolio Evaluation*. N.p.: UN Women.
<https://gate.unwomen.org/EvaluationDocument/Download?evaluationDocumentID=9478>.

- UN Women. 2020. *UN Women Nigeria Annual Report 2020*. N.p.: UN Women.
https://africa.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Africa/Attachments/Publications/2021/10/UN%20Women%20Nigeria%20Country%20Office%20Annual%20Report%202020_compressed_rotated.pdf.
- UN Women. 2020. *Country Portfolio Evaluation : Nigeria*. N.p.: UN Women.
<https://gate.unwomen.org/EvaluationDocument/Download?evaluationDocumentID=9487>.
- UN Women. n.d. “Facts and Figures: Economic Empowerment.” UN Women. Accessed December 20, 2022. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures>.
- UN Women Africa. n.d. “Women Economic Empowerment (WEE).” UN Women Africa. Accessed Desember 18, 2022. <https://africa.unwomen.org/en/where-we-are/west-and-central-africa/nigeria/women-economic-empowerment>.
- World Bank. 2018. *International Development Association Project Appraisal Document on A Proposed Credit to The Federal Republik of Nigeria*. N.p.: World Bank.
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/207671530329469779/pdf/NIGERIA-PAD-05252018.pdf>.
- World Bank. 2019. “An Analysis of the Implications for the Nigeria For Women Project.” In *GENDER-BASED VIOLENCE*, 48. Washington D.C, United State of America: The World Bank.
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/731521555064925144/pdf/Gender-Based-Violence-An-Analysis-of-the-Implications-for-the-Nigeria-for-Women-Project.pdf>.
- World Bank. n.d. “Labor Force Female Total Nigeria.” The World Bank Data. Accessed December 20, 2022. <https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS?end=2020&locations=NG&start=2017>.
- World Economic Forum. 2017. *Gender Gap Report 2017 Nigeria*. N.p.: World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf.

World Economic Forum. 2018. *Gender Gap Report 2018*. N.p.: World Economic Forum.

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf.

Zakaria, Yakubu. 2001. "Entrepreneurs at Home: Secluded Muslim Women and Hidden Economic Activities in Northern Nigeria." *Nordic Journal of African Studies* 10

(1): 107-123. <https://www.njas.fi/njas/article/view/594/423>.

